



# RENSTRA PERUBAHAN 2014 – 2018



**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MERANGIN**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
MERANGIN**



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**DINAS KESEHATAN**

**Jl. Jend. Sudirman KM 2, Telp (0747) 21214 Fax (0746) 21204**  
**BANGKO**



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN**  
**NOMOR TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN**  
**TAHUN 2014-2018**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Perangkat Kerja Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat at indikatif;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarkodan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemmerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana . Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- . Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang .  
. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang .  
. Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah .  
. Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang .  
. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang .  
. pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang .  
. Laporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2007tentang .  
. Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang .  
. Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun .  
. 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 .  
. tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 657, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780);

- 22 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811) ;
- 23 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rencana Anggaran, Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2014 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690,);
- 24 . Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
- 25 . Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 7);
- 26 . Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
- 27 . Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 12);
- 28 . Peraturan Bupati Merangin Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 41).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018

KESATU : Menetap kan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Bidang, Kasubid dan Kasubag di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Bangko

Pada tanggal :

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MERANGIN



dr. H. SOLAHUDDIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196502131998031002

### Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Merangin, di Bangko;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, di Bangko;
3. Yth. Sdr. Inspektur Kab. Merangin, di Bangko;
4. Arsip

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah SWT sehingga penyelesaian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin 2014-2018 dapat terlaksana. Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat diberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis. Kegiatan perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran dan kinerja pembangunan daerah.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2011-2016 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan

memperhatikan Tujuan, Sasaran, Target, Indikator Kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin 2014-2018 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin selama masa lima tahun kedepan.

Demikian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin 2014-2018 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MERANGIN



**dr.H.SOLAHUDDIN**  
Pembina Utama Muda

NIP.196502131998031002



# DAFTAR ISI

<b>SURAT KEPUTUSAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KESEHATAN...</b>	<b>11</b>
2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	11
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan.....	31
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan.....	37
2.4 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2008-2013....	41
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Merangin .....	42
<b>BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN               FUNGSI.....</b>	<b>44</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	44
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	49
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	52
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	52
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	58
<b>BAB IV    VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SASARAN DAN               KEBIJAKAN .....</b>	<b>61</b>
4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan .....	61
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin .....	62
4.3 Strategi dan Kebijakan.....	65

<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2014-2018.....</b>	<b>93</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2016 (Menurut Jabatan dan Eselonering).....	30
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Tahun 2016 (Menurut Pendidikan Profesi dan Jenis Kepegawaian).....	32
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Tahun 2016 (Menurut Jabatan dan Tingkat Penjenjangan) .....	33
Tabel 2.4	Diklat Struktural yang telah diikuti Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.....	33
Tabel 2.5	Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin Tahun 2016.....	35
Tabel 2.6	Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2016 .....	36
Tabel 2.7	Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin tahun 2016.....	37
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja sesuai Tupoksi Dinas Kesehatan Tahun 2008 – 2013.....	38
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2008 – 2013.....	40
Tabel 2.10	Perkembangan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2009 – 2016 .....	40
Tabel 3.1	Formulasi Strategi SWOT .....	46
Tabel 3.2	Misi III : Meningkatkan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan Kesehatan .....	51
Tabel 4.1	Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi ....	63
Tabel 4.2	Sasaran yang ditempuh untuk mencapai Tujuan .....	64
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.....	65
Tabel 4.4	Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal .....	66
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.....	68
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin .....	93
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.....	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan taktis - strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Disamping itu rencana strategis memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan.

Rencana Strategis SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD. Renstra berperan sebagai penyelenggara dalam pembangunan daerah salah satunya adalah dalam pembangunan bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, oleh pemerintah, pemerintah maupun pemerintah Kabupaten/kota beserta masyarakat, termasuk dunia usaha. Sebagai arah dan strategi untuk mencapai target pembangunan di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan bersifat indikatif yang memuat program pembangunan kesehatan masyarakat Merangin dengan indikator kinerja yang ditetapkan, sebagai pedoman dalam penanganan

permasalahan kesehatan di Kabupaten Merangin dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 89 ayat (2) bahwa Renstra SKPD disusun dengan tahapan yaitu :

1. Persiapan penyusunan Renstra SKPD
2. Penyusunan rancangan Renstra SKPD
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD
4. Penetapan Renstra SKPD

Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Merangin terpilih berdasarkan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merangin tahun 2013. Dokumen Rencana Strategis merupakan suatu tatanan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan dinamika perubahan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan antara lain seperti Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin 2014-2018 dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan demikian akan tercipta sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat

jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemmerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;



21. Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2013;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
24. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan
30. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/2013 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014;

33. Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021
38. Peraturan daerah Kabupaten Merangin No 10 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10)
39. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organsasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Daerah
40. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang ketentuan , Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39)

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014-2018 dapat tercapai.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi program dan kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
3. Memudahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program/kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin untuk memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.
5. Untuk mengukur kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur perencana pembangunan.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2014 sampai Tahun 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, landasan normative penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN UMUM, Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi serta data pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dengan maksud mengetahui keadaan Bappeda Kabupaten Merangin dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Bappeda Kabupaten Merangin lima tahun kedepan
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, Bab ini menguraikan rumusan tugas pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan serta TUPOKSI Sekretariat dan masing-masing Bidang serta rumusan tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaku aktivitas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DANKEBIJAKAN, Bab ini menguraikan rumusan Visi dan Misi serta kebijakan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Merangin.
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF, Bab ini berisikan rencana program kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Merangin.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN, Bab ini berisikan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2014 sampai dengan 2018.

BAB VII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

#### **DINAS KESEHATAN**

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Penyediaan obat dan perbekalan, 2) Upaya kesehatan masyarakat, 3) Pengawasan obat dan makanan, 4) Pengembangan Obat Asli Indonesia, 5) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, 6) Perbaikan gizi masyarakat, 7) Pengembangan lingkungan sehat, 8) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, 9) Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya, 11) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, 12) pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, dan 13) Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta Globalisasi dan demokrasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.

#### **2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**

Berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 22 Tahun 2008 mengenai Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 3) dan Peraturan Bupati Merangin

Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Kelapa Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

**A. Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**

1. Dinas Kesehatan sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan operasional kegiatan di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat, pengawasan dan pengendalian kesehatan serta melaksanakan ketatausahaan dinas.
2. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**B. Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kesehatan dan tugas pembantuan. Dengan peraturan Bupati Merangin Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 22 Tahun 2008 mengenai Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Merangin mempunyai struktur sebagai berikut :

## **I. KEPALA**

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud diatas, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program dan pelayanan kesehatan dasar
- b. Penyelenggaran Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
- c. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Meliputi, upaya Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif
- d. Melaksanakan pembinaan teknis dan operasional dalam upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan
- f. Penyelenggaraan upaya perizinan
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan administrasi umum, Kepegawaian dan organisasi tata laksana dan Keuangan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Tugas dan fungsinya

(1) Kepala Dinas Kesehatan membawahi:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pelayanan dan Promosi Kesehatan ;
- c. Bidang Kesehatan Keluarga
- d. Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
- e. Bidang Farmasi dan Jamsarkes
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dipimpin oleh seorang kepala Puskesmas, Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium dan Logistik Farmasi dan perbekalan Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala.

## **II. SEKRETARIAT**

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan penyelenggaraan ketatausahaan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan keuangan serta Perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, penggerakan dan pengawasan pengelolaan organisasi Umum dan kepegawaian, keuangan dan Perencanaan, Hukum, Kehumasan dan Perlengkapan serta Evaluasi pelaporan
- b. Pengembangan sistim dan koordinasi pengelolaan Umum dan kepegawaian, keuangan dan Perencanaan, Hukum, Kehumasan dan perlengkapan serta Evaluasi dan pelaporan
- c. Merumuskan rancangan rencana kebijakan penyusunan pengelolaan Umum dan kepegawaian, keuangan dan Perencanaan, Hukum, Kehumasan dan Perlengkapan serta Evaluasi pelaporan
- d. Pengembangan sistem dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan program kesehatan
- e. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam urusan Umum dan kepegawaian, keuangan dan Perencanaan, Hukum, Kehumasan dan Perlengkapan serta Evaluasi pelaporan
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan tugas Umum dan kepegawaian, keuangan dan Perencanaan, Hukum, Kehumasan dan Perlengkapan serta Evaluasi pelaporan

g. Mengkoordinasi penyusunan Reperda kesehatan dan sistim kesehatan Kabupaten

h. Sekretariat terdiri dari:

2.1. Sub Bagian Kepegawaian

2.2. Sub Bagian umum dan Keuangan

2.3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana poin h ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kepegawaian dan koordinasi dalam pelaksanaan, Registrasi, Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud diatas, Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi;

- a. Mengelola dan penataan administrasi umum,
- b. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan urusan umum, protokoler, kerumah tanggaan dinas
- c. Merumuskan rancangan rencana kebijakan dan analisis surat menyurat yang berkaitan dengan urusan kepegawaian.
- d. Melaksanakan mutasi tenaga kesehatan
- e. Mengembangkan dan melaksanakan Sistim Informasi Kepegawaian.
- f. Melakukan pembinaan dan bimbingan serta evaluasi kepada staf kepegawaian.
- g. Melaksanakan Registrasi dan Akreditasi, serta Sertifikasi tenaga kesehatan.

- h. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam Pelaksanaan Registrasi, Akreditasi serta sertifikasi alat dan tenaga kesehatan tertentu
- i. Menyelenggarakan pengembangan sistim Pendidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan

## 2.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok Menyelenggarakan urusan Kerumahtanggaan, penatausahaan keuangan, organisasi, Perlengkapan, hukum dan humas serta perizinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan urusan umum, protokoler, kerumah tanggaan dan keuangan.
- b. Menata kearsipan dalam urusan umum, keuangan dan kerumah tanggaan serta protokoler.
- c. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan perlengkapan dinas
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran rutin, Gaji, pembangunan dilingkungan dinas dan UPT.
- e. Menyelenggarakan Sistim Akuntansi Barang Milik Daerah (SABMD) dan Sistim Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
- f. Mendayagunakan barang kekayaan milik negara.

## 2.3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok menyelenggrakan urusan perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan program kesehatan
- b. Melaksanakan Perencanaan penganggaran kegiatan program
- c. Melaksanakan perhitungan pembiayaan kesehatan tingkat Kabupaten (*District Health Account - DHA* ), LAKIP dan laporan tahunan serta LKPJ Bupati.
- d. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi program.
- e. Menyusun dan mengevaluasi Renstra, Penetapan Kinerja tahunan (PKT), RPJMD bidang kesehatan, SKD (Sistim Kesehatan Daerah), *Term Of Refrence* ( TOR ), dan Pembiayaan kegiatan program

### **III. BIDANG PELAYANAN DAN PROMOSI KESEHATAN**

Bidang Pelayanan dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dasar dan Promosi kesehatan serta Sistim Informasi Kesehatan (SIK).

Untuk menyelenggarakan tugasnya, bidang pelayanan dan promosi kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan upaya kesehatan dasar, Promosi Kesehatan dan SIK.
- b. Pengembangan sistim upaya pelayanan kesehatan dasar, Promosi Kesehatan dan SIK.
- c. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dalam upaya pelayanan kesehatan dasar, Promosi Kesehatan dan SIK.
- d. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam urusan kesehatan dasar, Promosi Kesehatan dan SIK.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan kesehatan dasar, Promosi Kesehatan dan SIK.
- f. Bidang Pelayanan dan Promosi Kesehatan membawahi:
  - 3.1. Seksi Pelayanan Kesehatan dasar
  - 3.2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

### 3.3. Seksi SIK (Sistim Informasi Kesehatan)

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### 3.1. Seksi Pelayanan Kesehatan dasar

Seksi Pelayanan Kesehatan dasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi pelayanan kesehatan dasar, mempunyai fungsi;

- a. Melaksanakan kebijakan, dan pedoman dalam upaya pelayanan kesehatan Dasar
- b. Melaksanakan pembinaan pengendalian dan pengawsan dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan penunjang
- c. Menyusun perencanaan kegiatan program upaya pelayanan kesehatan dasar dan Pelayanan Kesehatan penunjang
- d. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan Pelayanan Kesehatan penunjang pelayanan kesehatan dasar dan Pelayanan Kesehatan penunjang
- e. Melaksanakan pembinaandan mengevaluasi manajemen puskesmas

#### 3.2. Seksi Promosi Kesehatan dan Perberdayaan

Seksi Promosi Kesehatan dan Perberdayaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya promosi kesehaan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, seksi Promosi Kesehatan dan Perberdayaan mempunyai fungsi;

- a. Melaksanakan kebijakan dan pedoman dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

- b. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- c. Menyusun perencanaan kegiatan program upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- d. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- e. Melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- f. Menyelenggarakan upaya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Poskesren dan UKBM
- g. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan Kesehatan Suku Anak Dalam (SAD)

### 3.3. Seksi Sistim Informasi Kesehatan (SIK)

Seksi Sistim Informasi Kesehatan (SIK) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan manajemen Sistim Informasi Kesehatan.

Untuk menyelenggarakan pokok, Seksi Sistim Informasi Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan nasional dan daerah dalam urusan SIK
- b. Melaksanakan Pembinaan dan pengendalian SIK
- c. Mengembangkan sisim dan rancangan pelaksanaan SIK
- d. Penggerakan SIK
- e. Menyelenggarakan Bank Data Kesehatan Kabupaten
- f. Menyusun profil Kesehatan Kabupaten

## **IV. BIDANG KESEHATAN KELUARGA**

Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga) mempunyai tugas melaksanakan upaya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Gizi serta Kesehatan Intitusi dan Kesehatan Reproduksi (KESPRO).

Untuk Melaksanakan tugas pokok, Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga) mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan upaya kesehatan ibu dan anak, Gizi serta kesehatan institusi dan kespro
- b. Pengembangan sistim upaya ibu dan anak, Gizi serta kesehatan institusi dan kespro
- c. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dalam upaya ibu dan anak, Gizi serta kesehatan institusi dan kespro
- d. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam ibu dan anak, Gizi serta kesehatan institusi dan kespro
- e. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan ibu dan anak, Gizi serta kesehatan institusi dan kespro
- f. Bidang Kesehatan Keluarga Membawahi ;
  - 4.1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak
  - 4.2. Seksi Gizi
  - 4.3. Seksi Kesehatan Instiusi dan kespro

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ini dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### 4.1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak

Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan dan podoman dalam upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta keluarga berencana
- b. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasandalam meningkatkan upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta keluarga berencana
- c. Menyusun perencanaan kegiatan program upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta keluarga berencana

- d. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta keluarga berencana
- e. Melakukan pembinaan dan mengevaluasi upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta keluarga berencana

#### 4.2. Seksi Gizi

Seksi Gizi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya perbaikan gizi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud seksi gizi mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan rencana aksi pangan dan gizi
- b. Melaksanakan SKPG (sistem kewaspadaan pangan dan gizi) dan surveillance pangan dan gizi
- c. Melaksanakan upaya penanggulangan masalah gizi
- d. Melakukan pembinaan, Pengawasan dan pengendalian program gizi
- e. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan upaya penanggulangan masalah gizi masyarakat
- f. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi program gizi

#### 4.3. Seksi Kesehatan Instiusi dan kespro

Seksi Kesehatan Instiusi dan kespro mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya kesehatan intitusi dan kesehaan reproduksi. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Kesehatan Kesehatan Institusi dan kespro mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pelayanan Kesehatan Institusi dan kespro .
- b. Melaksanakan pembinaan dan penendalian Kesehatan Institusi dan kespro
- c. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi Kesehatan Institusi dan kespro



- d. Menyusun perencanaan kegiatan program Kesehatan Institusi dan kespro

**V. BIDANG PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN**

Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan penyehatan lingkungan (P2M-PL) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit, Imunisasi, Wabah dan bencana serta Penyehatan Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan penyehatan lingkungan (P2M-PL) mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit, Imunisasi, Wabah dan bencana serta Penyehatan Lingkungan.
- b. Pengembangan sistem upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit, Imunisasi, Wabah dan bencana serta Penyehatan Lingkungan.
- c. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dalam upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit, Imunisasi, Wabah dan bencana serta Penyehatan Lingkungan.
- d. Melaksanakan koordinasi Lintas Sektor dalam upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit, Imunisasi, Wabah dan bencana serta Penyehatan Lingkungan.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit, Imunisasi, Wabah dan bencana serta Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang P2M-PL membawahi ;
  - 5.1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
  - 5.2. Seksi Imunisasi, Wabah dan Bencana
  - 5.3. Seksi Kesehatan Lingkungan

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ini dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### 5.1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit, Imunisasi, Wabah dan bencana serta Penyehatan Lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengendalian dan pemberantasan penyakit
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian dan pemberantasan penyakit
- c. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sector pengendalian dan pemberantasan penyakit
- d. Melaksanakan evaluasi pengendalian dan pemberantasan penyakit

#### 5.2. Seksi Imunisasi, Wabah dan Bencana

Seksi Imunisasi, Wabah dan Bencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan imunisasi, penanggulangan wabah dan bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok , Seksi Imunisasi, Wabah dan Bencana mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan dan pedoman imunisasi, penanggulangan wabah dan bencana
- b. Melaksanakan pembinaan dan imunisasi, penanggulangan wabah dan bencana
- c. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor imunisasi, penanggulangan wabah dan bencana

- d. Melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi imunisasi, penanggulangan wabah dan bencana
- e. Menyusun perencanaan kegiatan imunisasi, penanggulangan wabah dan bencana

### 5.3. Seksi Kesehatan Lingkungan

Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya Kesehatan Lingkungan

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan dan pedoman upaya Kesehatan Lingkungan.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian Kesehatan Lingkungan
- c. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor upaya Kesehatan Lingkungan
- d. Melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi upaya Kesehatan Lingkungan
- e. Menyusun perencanaan kegiatan kegiatan upaya Kesehatan Lingkungan

## **VI. BIDANG FARMASI DAN JAMSARKES**

Bidang Farmasi dan Jamsarkes (Jaminan dan sarana kesehatan) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan jaminan kesehatan, sarana, peralatan kesehatan, farmasi serta makanan dan minuman.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Farmasi dan Jamsarkes (Jaminan dan sarana kesehatan) mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan upaya pelayanan kefarmasian, jaminan kesehatan, sarana, peralatan kesehatan, serta makanan dan minuman.

- b. Pengembangan sistim upaya pelayanan kefarmasian, jaminan kesehatan, sarana, peralatan kesehaan, serta makanan dan minuman.
- c. Merumuskan kebijakan tehnis dan operasional dalam upaya pelayanan kefarmasian, jaminan kesehatan, sarana, peralatan kesehaan, serta makanan dan minuman.
- d. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya pelayanan kefarmasian, jaminan kesehatan, sarana, peralatan kesehaan, serta makanan dan minuman.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan kefarmasian, jaminan kesehatan, sarana, peralatan kesehaan, serta makanan dan minuman.
- f. Bidang Jaminan dan Sarana kesehatan membawahi;
  - 6.1 Seksi Jaminan Kesehatan
  - 6.2 Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan
  - 6.3 Seksi Farmasian, Makanan dan Minuman

Masing-masing seksi dipimpin seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### 6.1. Seksi Jaminan Kesehatan

Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan upaya pelaksanaan Jaminan kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan upaya pelaksanaan jaminan kesehatan
- b. Pengembangan sistim upaya pelaksanaan jaminan kesehatan
- c. Merumuskan kebijakan tehnis dan operasional dalam upaya pelaksanaan jaminan kesehatan
- d. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sekor dalam upaya pelaksanaan jaminan kesehatan

- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan upaya pelaksanaan jaminan kesehatan

## 6.2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan

Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya ketersediaan Sarana dan Peralatan Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok , Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan upaya Sarana dan Peralatan Kesehatan
- b. Pengembangan sistim upaya ketersediaan Sarana dan Peralatan Kesehatan
- c. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dalam upaya Menyusun rancangan pedoman penggunaan Sarana dan Peralatan kesehatan
- d. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya ketersediaan Sarana dan Peralatan kesehatan
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan upaya ketersediaan Sarana dan Peralatan kesehatan

## 6.3. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman

Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya pelayanan kefarmasian, pengawsan Makanan dan Minuman

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Farmasian, Makanan dan Minuman mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan upaya pelayanan kefarmasian, pengawsan Makanan dan Minuman
- b. Pengembangan sistim upaya pelayanan kefarmasian, pengawsan Makanan dan Minuman

- c. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dalam upaya pelayanan kefarmasian, pengawasan Makanan dan Minuman
- d. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya pelayanan kefarmasian, pengawasan Makanan dan Minuman
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan kefarmasian, pengawasan Makanan dan Minuman

### **C. Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan Kesehatan;
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang kesehatan;
- e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang kesehatan;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Kesehatan;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Kesehatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

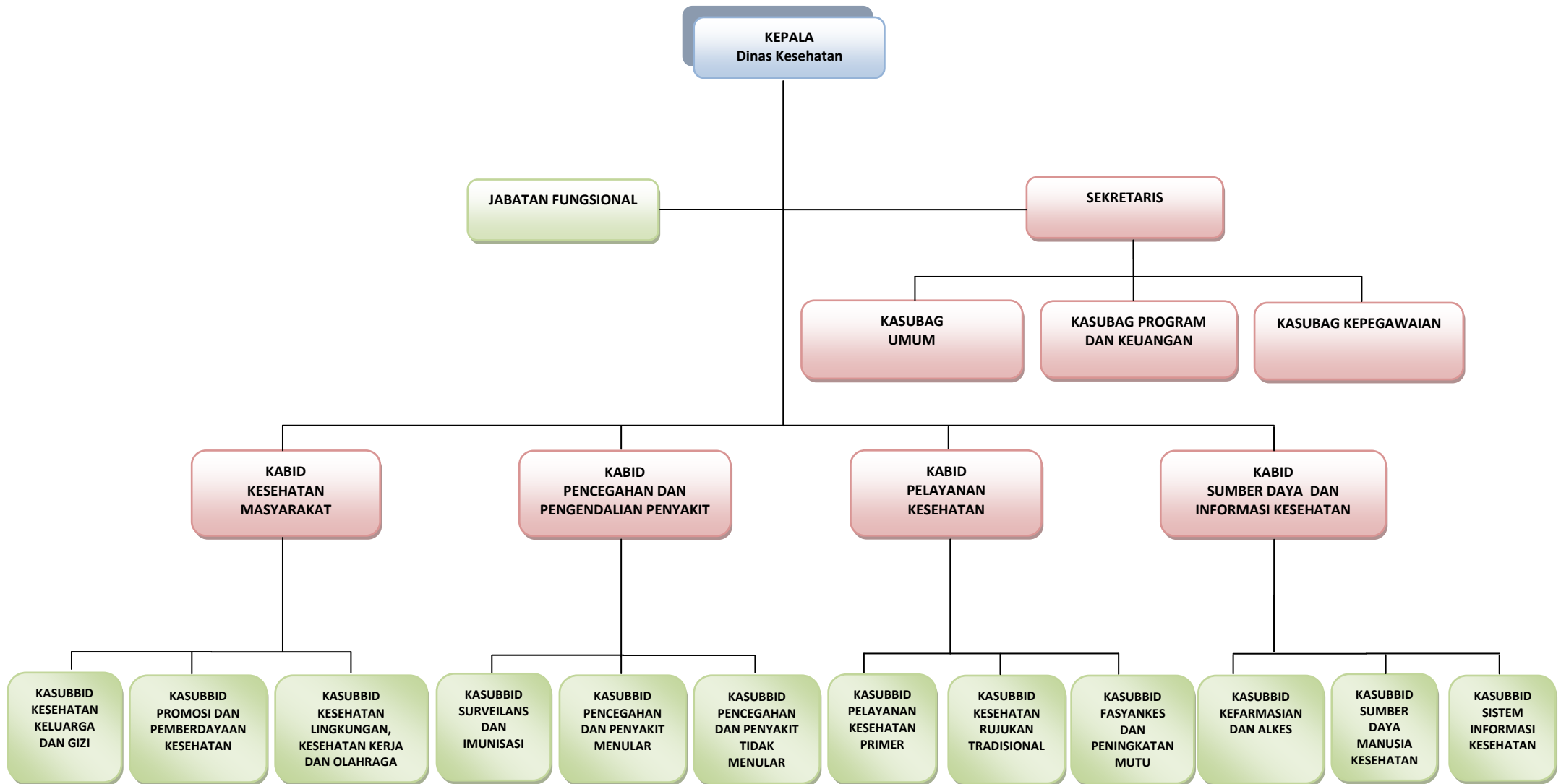
### **D. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**

Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat  
Terdiri dari tiga Sub Bagian, yaitu :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evapor
3. Bidang Kesehatan Keluarga  
Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Gizi
  - b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak
  - c. Seksi Kesehatan Reproduksi
4. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit  
Terdiri dari Tiga Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Kesehatan Lingkungan
  - b. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
  - c. Seksi Imunisasi, Wabah dan Bencana
5. Bidang Pelayanan Kesehatan  
Terdiri dari Tiga Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Sistem Informasi Kesehatan
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
  - c. Seksi Promosi Kesehatan
6. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan  
Terdiri dari tiga Seksi yaitu :
  - a. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman
  - b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan
  - c. Seksi Jaminan Kesehatan
7. Jabatan Fungsional

Dari uraian tugas pokok dan fungsi diatas maka didapat gambaran struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin seperti pada bagan berikut ini:

**BAGAN 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN**





## 2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

### 2.2.1 Data Pegawai Dinas Kesehatan

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai. Sebagai institusi perencana pembangunan di daerah, untuk dapat menghasilkan Kualitas Pelayanan yang baik dan berkualitas, dibutuhkan bermacam aparaturnya dengan disiplin ilmu yang berbeda. Demikian pula halnya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Aparatur yang ada berasal dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Keadaan pegawai pada Desember 2016 di Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin berjumlah 1.758 (Seribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan) Orang dengan rincian 632 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua) orang Pegawai Negeri Sipil, 211 ( Dua Ratus Sebelas ) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), 417 (Empat Ratus Tujuh Belas) Orang Tenaga Kontrak Daerah (TKD) dan 498 (Empat ratus Sembilan Puluh Delapan) Orang tenaga Kerja Sukarela (TKS). Gambaran keadaan pegawai dan perkembangannya selama Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**JUMLAH PEGAWAI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN**  
**TAHUN 2016(MENURUT JABATAN DAN ESELONING)**

NO	UNIT KERJA	PNS (Eselon/Orang)					STAF	PTT	TKD	TKS	TOTAL
		II	IIIA	IIIB	IVA	IVB					
1	Kepala Dinas	1								1	
2	Sekretariat		1		3		30	18	2	54	
3	Bidang Kesmas			1	3		12	5	1	22	
4	Bidang P2P			1	3		8	2	4	18	
5	Bidang Yankes			1	3		10	2	1	17	
6	Bidang SDIK			1	3		11	2	2	19	
7	Puskesmas				17	8	515	211	388	488	1.627
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>586</b>	<b>211</b>	<b>417</b>	<b>498</b>	<b>1.758</b>

Sumber : SubbagKepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Merangin Tahun 2016

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin menurut klasifikasi pendidikan Profesi dan Jenis Kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**JUMLAH PEGAWAI DINAS KESEHATAN TAHUN 2016**  
**(MENURUT PENDIDIKAN PROFESI DAN JENIS KEPEGAWAIAN)**

No	Pendidikan	Jenis Kepegawaian				JUMLAH
		PNS	PTT	TKD	TKS	
1	Dokter Umum	35	11	3	2	<b>51</b>
2	Dokter Gigi	10	8	0	0	<b>18</b>
3	Farmasi/S1/Apt	26	0	7	10	<b>43</b>
4	Perawat	207	0	134	138	<b>479</b>
5	Bidan	155	192	174	309	<b>830</b>
6	Kesmas/S2 Kesmas	69	0	27	20	<b>116</b>
7	Perawat Gigi	14	0	9	9	<b>32</b>
8	Gizi	11	0	1	0	<b>12</b>
9	Sanitasi	28	0	8	0	<b>36</b>
10	Teknis Medik	3	0	0	0	<b>3</b>
11	LCPK	16	0	0	0	<b>16</b>
12	Non Kesehatan/CS Puskesmas	44	0	45	4	<b>93</b>
13	Analisis Kesehatan	14	0	9	6	<b>29</b>
	<b>J u m l a h</b>	<b>632</b>	<b>211</b>	<b>417</b>	<b>498</b>	<b>1.758</b>

*Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Merangin Tahun 2016*

Untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural yang ada di Kabupaten Merangin, maka kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan maupun penjenjangan dapat diangkat pada jabatan struktural. Persyaratan penjenjangan diperoleh aparatur melalui Pendidikan dan Latihan Pimpinan (Diklatpim). Jumlah pegawai Dinas Kesehatan yang telah mengikuti Diklat Pim sampai Tahun 2016 adalah sebanyak 19 orang, gambaran Pegawai menurut jabatan dan tingkat penjenjangan yang telah mengikuti Diklat Pim dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3.**  
**JUMLAH PEGAWAI DINAS KESEHATAN TAHUN 2016**  
**MENURUT JABATAN DAN TINGKAT PENJENJANGAN**

No	Jabatan	Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan			Keterangan
		PIM II	PIM III	PIM IV	
1	Kepala Dinas	-	1	1	
2	Sekretaris	-	1	1	
2	Kabid	-	3	4	
3	Kasubag/ Kasi	-	1	10	
4	Kepala Puskesmas	-	-	2	
5	Kepala TU UPTD	-	-	-	
6	Staf	-	-	1	
<b>J u m l a h</b>			<b>6</b>	<b>19</b>	

Sumber : SubbagKepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Merangin Tahun 2016

Upaya pengembangan sumberdaya manusia di Dinas Kesehatan Kab. Merangin terus dilakukan setiap tahunnya melalui pendidikan dan latihan. Selain diklat struktural Dinas Kesehatan juga mengirimkan aparaturnya untuk mengikuti diklat-diklat fungsional. Untuk lebih jelasnya tabel berikut memperlihatkan data aparatur dan diklat-diklat yang pernah diikuti.

**Tabel 2.4**  
**DIKLAT STRUKTURAL YANG TELAH DIKUTI PEGAWAI**  
**DINAS KESEHATANKABUPATEN MERANGIN**

No	Nama	Jenis Diklat Struktural	Tahun	Tempat	Pelaksana
1	Dr. H. SOLAHUDDIN	Diklat PIM 4	2002	Jambi	
		Diklat PIM 3	2009	Bangko	
2	Abdaie, SKM, M.Ph	Diklat PIM 4	2008	Bangko	
		Diklat PIM 3	2013	Jambi	
3	Syaidina Ali, SKM, M.Kes	Diklat PIM 4	1998	Bengkulu	
		Diklat PIM 3	2006	Jambi	
4	Erlangga, SKM	Diklat PIM 3	2010	Jambi	
		Diklat PIM 4	2008	Jambi	
5	Bachder Oktaf, SKM	Diklat PIM 4	2010	Bangko	
		Diklat PIM 3	2014	Bukit Tinggi	
6	Haris N, SKM, M.Ph	Diklat PIM 3	2013	Jambi	

		Diklat PIM 4	2009	Bangko	
7	Zamroni, SKM	Diklat PIM 4	2009	Bangko	
8	Hermanto, SKM	Diklat PIM 4	2003	Sorolangun	
9	Mas'ud	Diklat PIM 4	2003	Bangko	
10	Abd. Rahman, S.Pd	Diklat PIM 4	2005	Jambi	
11	Ashari, SKM	Diklat PIM 4	2007	Bangko	
12	Mustamin, SKM	Diklat PIM 4	2009	Bangko	
13	Amroni, SKM	Diklat PIM 4	2010	Bangko	
14	Adrian, S.Farm. Apt	Diklat PIM 4	2010	Bangko	
15	Afdal	Diklat PIM 4	2015	Bangko	
16	Fajar Lestari, SKM	Diklat PIM 4	2015	Bangko	
17	Jaswandi	Diklat PIM 4	2009	Bangko	
18	Erniyanti	Diklat PIM 4	2014	Bangko	
19	Antoni Putra	Diklat PIM 4	2002	Jambi	

*Sumber : SubbagKepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Merangin Tahun 2016*

## **2.2.2 Data Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten**

### **Merangin**

Peningkatan kapasitas dan jangkauan sarana dan prasarana kesehatan sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan dan mendekatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Kebutuhan sarana dan prasarana tergantung pada uraian jabatan, jumlah jabatan struktural dan fungsional, jumlah pegawai dan kemampuan keuangan. Sebagai OPD yang membantu Bupati Merangin dalam manajemen kesehatan daerah sarana dan prasarana yang diperlukan akan dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan terutama dalam menunjang kegiatan administrasi kesehatan. Puskesmas dan jaringannya merupakan sarana penyelenggara pelayanan kesehatan dasar dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak dan semakin meratanya jumlah ketersediaan fasilitas kesehatan maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. gambaran sarana dan prasarana yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Merangin dapat dijelaskan pada tabel-tabel di bawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah**  
**Menurut Kecamatan Di Kabupaten Merangin Tahun 2016**

No	Kecamatan	Pus kesmas	Pustu	Polindes	Pos Kesdes
1	Bangko	2	2	1	2
2	Nalo Tantan	1	5	2	1
3	Bangko Barat	-	4	2	1
4	Batang Mesumai	1	4	1	3
5	Pamenang	1	8	4	5
6	Pamenang Barat	1	4	3	2
7	Renah Pamenang	1	3	1	-
8	Pamenang Selatan	1	4	1	1
9	Tabir	2	2	2	6
10	Tabir Selatan	1	6	1	-
11	Tabir Timur	1	2	1	3
12	Tabir Iilir	2	4	-	1
13	Tabir Lintas	-	2	0	3
14	Margo Tabir	1	1	1	1
15	Tabir Ulu	1	2	1	1
16	Tabir Barat	1	9	1	7
17	Sungai Manau	1	3	3	4
18	Renah Pembarap	1	3	2	5
19	Pangkalan Jambu	1	3	1	4
20	Muara Siau	1	2	4	6
21	Lembah Masurai	1	5	1	4
22	Tiang Pumpung	1	3	1	1
23	Jangkat	1	5	2	5
24	Sungai Tenang	1	6	1	3
<b>JUMLAH</b>		25	92	37	69

*Sumber : Profil Dinas Kesehatan Tahun 2016*

**TABEL 2.6**  
**Sarana Pelayanan Kesehatan**  
**Kabupaten Merangin Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>JENIS SARANA KESEHATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	RS Pemerintah (RSUD)	1
2	RS Swasta	2
3	Puskesmas Rawat Inap	11
4	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	13
5	Puskesmas Mampu PONED	6
6	Puskesmas Keliling	23
7	Puskesmas Pembantu	92
8	Laboratorium Kesehatan Daerah	1
9	Laboratorium Swasta	1
10	Praktek Dokter Umum	99
11	Prakter Dokter Spesialis	12
12	Praktek gigi	17
13	Pr aktek Bidan Mandiri	30
14	Praktek Pengobatan Trandisional	1033
15	Klinik Pratama	10
16	Apotek	32
17	Gudang Farmasi Dinas Kesehatan	1

*Sumber : Profil Dinas Kesehatan Tahun 2016*

**Tabel 2.7**  
**Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Merangin Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>
1	Puskesmas Keliling Roda 4	23
2	Puskesmas Keliling Roda 2	43
3	Ambulan	2
4	Kendaraan Operasional Roda 4	8
5	Kendaraan Operasional Roda 2	22
6	Generator Set	7
7	Mesin Foging	5
8	Cold Chain	10
9	Komputer	75
10	Laptop	33
11	Meja	588
12	Kursi	635

*Sumber : Subbidang Umum dan Kepegawaian*

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**

Sesuai dengan tupoksinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin didominasi oleh Pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Merangin, Indikator Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemukakan ada atau tidaknya kesenjangan pelayanan kesehatan, target yang telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Dinas kesehatan ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Gambaran kinerja pelayanan Dinas kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.5 Target dan Capaian Indikator sesuai dengan Tuposi dan Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2008 – 2013.

**Tabel 2.8**

**Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi  
Dinas Kesehatan Tahun 2008-2013**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target Renstra SKPD Tahun 2009-2013					Realisasi Capaian Tahun 2009-2013				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	95	95	95	92	93	94	88,11	88,11	86,2	84,44	86,6
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80	80	80	63	68	71	71,43	100	45	61,59	66,4
3	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki kompetensi Kebidanan	90	90	90	88	88,5	89	94,24	94,24	77,6	81,10	82,7
4	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	90	90	90	80	80	89	94,55	94,55	30	81,25	82,6
5	Cakupan desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100	100	100	75	75	95	66,06	66,06	78	89,02	91
6	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani	80	80	80	88	70	75	59,60	59,60	78,13	10,65	66,6
7	Cakupan Pelayanan Anak Balita	90	90	90	90	80	85	37,01	37,01	85	68,06	83,08
8	Cakupan Kunjungan Bayi	90	90	90	90	80	85	84,24	84,24	86	88,85	91,5
9	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	100	100	100	90	100	100	75,20	75,20	80	100	100







Tabel 2.6 mengemukakan pada tahun mana saja realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur atau mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya.

#### 2.4 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2008-2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kesehatan dan tugas pembantuan. Maka telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta tujuan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

**Tabel 2.10**  
**Perkembangan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**  
**Tahun 2009-2016**

NO	TAHUN	ALOKASI ANGGARAN		JUMLAH (Rp)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	2009	14.967.259.000	19.388.288.000	34.355.547.000
2.	2010	17.134.528.000	9.677.559.000	26.812.087.000
3.	2011	17.920.550.000	23.601.297.108	41.521.847.108
4.	2012	25.236.422.000	11.523.804.091	36.760.226.091
5.	2013	26.104.010.679	16.852.301.395	42.956.312.074
6.	2014	30.955.613.000	27.422.213.184	58.377.826.184
7.	2015	35.684.555.000	29.981.581.873	65.666.136.873
8.	2016	39.313.687.460	56.165.791.578	95.479.479.038

#### 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi, mempunyai peluang sekaligus kendala dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. SPM yang merupakan program nasional tidak termasuk dalam penyediaan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga daerah

harus mengalokasikan sendiri anggaran yang dibutuhkan. Dengan adanya penghematan anggaran maka beberapa kegiatan terpaksa harus ditunda dulu pelaksanaannya;

2. Lemahnya sistem monitoring dan pengendalian kegiatan.
3. Rencana pencapaian target SPM belum tersusun sesuai dengan kemampuan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.
4. Masalah definisi operasional dalam petunjuk teknis masih menjadi kendala dalam pelaksanaan dilapangan, karena masalah ketersediaan data;
5. Untuk beberapa indikator yang belum tercapai:
  - a. Capaian Cakupan Desa atau Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) berdasarkan angka tabel diatas masih di perlukan upaya untuk ditingkatkan. Adapun masalah yang ditemukan adalah jumlah data sasaran bayi, dimana berdampak pada perhitungan pencapaian di beberapa wilayah kerja Puskesmas. Selain itu koordinasi lintas sektoral pun perlu diadakan di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan dukungan dari Camat, Lurah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memperoleh imunisasi dasar lengkap hingga dapat meningkatkan cakupan program imunisasi.
  - b. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit dimana masih terdapat perbedaan pemahaman antara pemegang program dan pelaksana kegiatan terhadap definisi operasional indikator. Tidak semua petugas kesehatan memiliki kemampuan melakukan klasifikasi penyakit misalnya *pneumonia*. Hal ini juga merupakan sebuah kendala yang sangat berpengaruh dalam pencapain indikator penemuan dan penanganan penderita penyakit. Kemungkinan tidak semua penderita penyakit mengunjungi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan.
  - c. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin terkait perhitungan untuk menentukan target capaian indikator yang sudah terlayani di sarana kesehatan masih

sulit karena penetapan capaian didasarkan pada jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Merangin, hal ini tentu sangat berpengaruh dalam pencapaian program.

Untuk melihat sejauh mana tingkat persiapan dan perkembangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemimpin Kegiatan, telah dilakukan evaluasi baik dalam bentuk rapat staf secara berkala maupun pertanggung jawaban laporan per triwulan. Melalui upaya ini, secara umum tidaklah ditemukan hambatan dan permasalahan yang sangat prinsipil dalam rangka penyelesaian kegiatan dimaksud.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Dinas Kesehatan bertugas menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas kesehatan mempunyai fungsi melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bina kesehatan masyarakat serta pengembangan sumber daya kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dan telah berhasil dicapai beberapa indikator kinerja, namun masih ditemukan adanya beberapa permasalahan spesifik.

Pembangunan bidang kesehatan terutama diarahkan untuk pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada seluruh masyarakat, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemberi pelayanan dalam hal ini Dinas Kesehatan. Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan kesehatan Kabupaten Merangin yang akan dihadapi. Berdasarkan pada evaluasi program dan kegiatan serta kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada

warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

Disamping upaya promotif dan preventif tersebut di atas, upaya penting lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Balai Pengobatan, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Klinik Kesehatan, dan rumah sakit.

Ukuran yang biasa digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan diantaranya adalah angka kematian ibu, bayi dan balita, angka kesakitan, status gizi, serta penyakit spesifik lokal seperti DBD, filariasis (kaki gajah) dan malaria yang merupakan kasus endemis di Kab. Merangin. Meskipun memiliki tren penurunan namun, masih terdapat kasus kematian ibu pada 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut ; 2012 sebanyak 16 orang, tahun 2013 sebanyak 12 orang, tahun 2014 sebanyak 8 orang dan tahun 2015 sebanyak 9 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 6 orang. Kasus kematian bayi (neonatus+bayi) 4 tahun terakhir sebagai berikut ; tahun 2012 sebanyak 103 bayi, tahun 2013 sebanyak 82 bayi, tahun 2014 sebanyak 48 bayi, tahun 2015 menurun sebanyak 35 bayi dan pada tahun 2016 sebanyak 3 bayi.

Banyak faktor yang menyebabkan kejadian kematian dan kesakitan, diantaranya masih buruknya sanitasi/kesehatan lingkungan, pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang kesehatan, adanya beberapa kebiasaan/kebudayaan masyarakat yang bertentangan dengan kaidah kesehatan, belum melambaganya perilaku hidup bersih dan sehat, dan status ekonomi masyarakat yang masih rendah terutama di pedesaan.

### 3.1.1 Analisis SWOT

**Tabel 3.1**  
**Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT)**

<p align="center"><b>ALI :</b> Analisis Lingkungan Internal</p> <p align="center"><b>ALE :</b> Analisis Lingkungan Eksternal</p>	<p align="center"><b><u>STRENGTH</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitas SDM kesehatan memadai</li> <li>2. Sarana/prasarana Kerja yang memadai</li> <li>3. Adanya UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dan legislatif dalam pembangunan kesehatan</li> <li>5. Tersedianya dukungan anggaran dari berbagai sumber</li> </ol>	<p align="center"><b><u>WEAKNESS</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya</li> <li>2. Belum meratanya ketersediaan SDM Kesehatan profesi tertentu (Tenaga Medis, Farmasi, Analis, Sanitarian dan Kesehatan Masyarakat)</li> <li>3. Profesionalisme tenaga kesehatan secara fungsi belum optimal</li> <li>4. Belum meratanya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.</li> <li>5. Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata</li> </ol>
<p align="center"><b><u>OPPORTUNITIES</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>2. Adanya komitmen politis / dukungan politis Pemda</li> <li>3. Partisipasi masyarakat dan swasta di bidang kesehatan</li> <li>4. Perkembangan teknologi</li> </ol>	<p align="center"><b><u>ASUMSI STRATEGI S-O</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pemeratan distribusi tenaga kesehatan</li> <li>2. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular</li> <li>3. Meningkatkan pendapatan daerah guna mendorong meningkatnya anggaran di bidang kesehatan</li> <li>4. Pengembangan tenaga kesehatan yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu</li> <li>5. Pola Kepimimpinan Kepala Daerah dan Legislatif yang kapabel dan aspiratif mendorong pembangunan kesehatan yang paripurna</li> </ol>	<p align="center"><b><u>ASUMSI STRATEGI W-O</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</li> <li>2. Meningkatkan Standarisasi pelayanan kesehatan</li> <li>3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dengan meningkatkan jumlah SDM, sarana dan prasarana sesuai dengan standar</li> <li>4. Pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat</li> <li>5. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang aktual dan akses yang mudah oleh masyarakat</li> </ol>



<b><u>THREAT</u></b>	<b><u>ASUMSI STRATEGI S-T</u></b>	<b><u>ASUMSI STRATEGI W-T</u></b>
1. Belum semua masyarakat terjamin pembiayaan kesehatannya 2. Letak geografis serta kondisi transportasi yang sulit menghambat pelayanan kesehatan 3. Masih tingginya kepercayaan masyarakat untuk berobat / melahirkan pada pelayanan non nakes 4. Prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat masih rendah	1. Pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin 2. Peningkatan pembinaan desa siaga aktif strata mandiri 3. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan	1. Penyelenggaraan Kartu Merangin Sehat (KMS) 2. Meningkatkan Jumlah Desa Siaga aktif strata mandiri 3. Penyediaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat

### **3.1.2 Analisis Lingkungan Internal**

#### **1) Kekuatan**

- a. Kuantitas SDM kesehatan yang memadai
- b. Sarana/prasarana Kerja yang memadai
- c. Adanya UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- d. Komitmen pemerintah daerah dan legislatif dalam pembangunan kesehatan
- e. Tersedianya dukungan anggaran dari berbagai sumber

#### **2) Kelemahan**

- a. Belum lengkapnya peralatan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
- b. Belum meratanya ketersediaan SDM Kesehatan profesi tertentu (Tenaga Medis, Farmasi, Analis, Sanitarian dan Kesehatan Masyarakat)
- c. Profesionalisme tenaga kesehatan secara fungsi belum optimal
- d. Belum meratanya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.
- e. Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata

### **3.1.3 Analisis Lingkungan Eksternal**

#### **1) Peluang**

- a. Kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
- b. Adanya komitmen politis / dukungan politis Pemda
- c. Partisipasi masyarakat dan swasta di bidang kesehatan
- d. Perkembangan teknologi

#### **2) Ancaman**

- a. Belum semua masyarakat terjamin pembiayaan kesehatannya

- b. Letak geografis serta kondisi transportasi yang sulit menghambat pelayanan kesehatan
- c. Masih tingginya keperluan masyarakat untuk berobat / melahirkan pada pelayanan non nakes
- d. Prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat masih rendah

Faktor Kunci Keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan Strategis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategis dengan memilih pengaruh yang terbesar diantara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang kan dicapai. Faktor Kunci Keberhasilan juga disebut sebagai kekuatan kunci.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil**

#### **Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan analisa terhadap pernyataan politik Bupati dan Wakil Bupatisemasa kampanye Pemilukada, kemudian kondisi umum dan masalah pembangunan serta isu-isu strategis Kabupaten Merangin saat ini, maka visiRPJMD 2014-2018 Kabupaten Merangin adalah:

Visi Daerah Kabupaten Merangin adalah “ **BERBENAH** menuju **MERANGIN EMAS**”.

**BANGUN EKONOMI RAKYAT:** Mengartikan bahwa hal yang utama dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang memungkinkan masyarakat menjalankan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi secara efisien dan efektif.

**BERSIH:** Mengartikan bahwa suatu kondisi dimana aparatur pemerintah daerah memberikan pelayanan yang prima dan akuntabel

**AMANAHAH:** Mengartikan bahwa aparatur negara menjalankann tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan disiplin.

Misi Daerah Kabupaten Merangin dalam mencapai Visi Daerah adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi Kepada Dengan Mengedepankan Transparansi, Efisiensi, Efektif Dan Akuntabilitas.
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar.

3. Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Dan Kesehatan.
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan UMKM.
5. Meningkatkan Prestasi Generasi Muda Dan Kesetaraan Gender.
6. Meningkatkan pengelolaan dan Perlindungan Hutan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui rekrutmen yang baik dan peningkatan kesejahteraan
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas
4. Mengembangkan kawasan sentra produksi, kawasan ekonomi strategis dan perumahan yang berkualitas
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi
6. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas
7. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan daya saing investasi, ketengakerjaan dan kinerja BUMD
8. Meningkatkan pendayagunaan, potensi agrowisata dan pengelolaan sumberdaya pertanian untuk kesejahteraan petani dan peningkatan pendapatan daerah
9. Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan
10. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur olahraga dan pembinaan atlet berprestasi
11. Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah

12. Meningkatkan penataan zona dan melestarikan kawasan hutan lindungan, cagar budaya tradisional melayu sebagai pusat penelitian dan, wisata alam dan budaya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, ditetapkan kriteria dan indikator-indikator komposit sebagai indikasi perwujudan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

<b>VISI : 'BERBENAH' ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS</b>			
<b>No</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
3	<b>MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN</b>	1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	1. Peningkatan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin yang mudah dijangkau serta berkualitas 2. Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap 3. Peningkatan ketersediaan peralatan, obat-obatan dan tenaga medis dan dokter umum dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas. 4. Peningkatan pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak
		2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi	1. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan pendidikan gratis berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik. 2. Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan disemua tingkatan administratif adalah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan yakni mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten)

melaksanakan pembangunan kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu :

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.**

Serta dilaksanakan oleh seluruh *stakeholders* jajaran kesehatan baik di Pusat maupun Daerah termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha. Renstra kementerian kesehatan juga menjadi acuan bagi daerah (provinsi kabupaten dan kota). Dengan memperhatikan arti dan makna visi dan misi Kementerian Kesehatan maka ditetapkan visi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 yaitu :

**“INSTITUSI YANG UNGGUL DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEHAT MANDIRI DAN BERKEADILAN MENUJU JAMBI TUNTAS 2021”**

Dalam rangka untuk mewujudkan visi SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi maka ditetapkan misi SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan
- b. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
- c. Meningkatkan standar Sumber Daya Manusia Kesehatan dan berdaya saing
- d. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Dengan adanya Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Menjadi Acuan Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin untuk membuat suatu Visi, Misi dan Tujuan Kesehatan. Sejalan dengan visi misi Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin mempunyai visi yaitu

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT MERANGIN YANG SEHAT DENGAN LAYANAN KESEHATAN MERATA DAN BERKUALITAS”.**

Dengan itu, maka terlihat adanya kesamaan visi antara Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kab.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) harus memperhatikan aspek kesehatan, disisi lain dalam paradigma sehat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait termasuk peruntukan tata ruang. Pembangunan aspek kesehatan dipastikan tidak akan melanggar rencana tata ruang wilayah.

Strategi pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten Merangin menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah, dalam mempercepat pengembangan wilayah, mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional, Provinsi Jambi dan kebutuhan daerah Kabupaten. Dengan mempertimbangkan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah pemukiman akan berimplikasi pada terjadinya alih fungsi tata ruang. Selain itu permasalahan lain yang terjadi adalah perselisihan bataswilayah, baik itu di wilayah desa, kecamatan maupun kabupaten, pelanggaran pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi dan cagar alam Hal ini akan menjadiperhatian utama dalam menyusun Renstra Dinas Kesehatan 2014-2018.

Perwujudan Rencana Sistem Pusat Kegiatan untuk bidang kesehatan sesuai dengan RPJMD tahun 2014-2018. Dari hirarki dan fungsi utama kawasan dapat diturunkan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana utama yang seharusnya dibangun dalam kerangka mewujudkan rencana struktur ruang yang telah dirumuskan. Adapun program utama yang dilakukan/disediakan untuk masing-masing pusat pengembangan kegiatan antara lain:

1. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) berupa Pembangunan Perkotaan Bangko meliputi pembangunan pusat kesehatan skala regional :
  - a. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B;

- b. Pembangunan rumah sakit swasta khusus/spesialis;
  - c. Pembangunan rumah sakit bersalin.
2. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa Pembangunan Perkotaan Rantau Panjang meliputi pengembangan pusat kesehatan skala sub regional :
    - a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
    - b. pembangunan puskesmas skala kecamatan.
  3. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa Pembangunan Perkotaan Pamenang meliputi pengembangan pusat kesehatan skala sub regional :
    - a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
    - b. pembangunan puskesmas skala kecamatan.
  4. Mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa Pembangunan Perkotaan Sungai Manau meliputi pengembangan pusat kesehatan skala sub regional :
    - a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
    - b. pembangunan puskesmas skala kecamatan.
  5. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa Pembangunan Perkotaan Pasar Masurai meliputi pengembangan pusat kesehatan skala sub regional :
    - a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
    - b. pembangunan puskesmas skala kecamatan.
  6. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Simpang Limbur Merangin meliputi pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan :
    - a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
    - b. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
  7. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Rawajaya meliputi pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan :
    - a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
    - b. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
  8. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Tambang Emas meliputi pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan :
    - a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
    - b. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.

9. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Meranti meliputi pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan :
  - a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
  - b. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
10. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Muara Madras meliputi pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan :
  - a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
  - b. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan
11. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Rantau Suli meliputi pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan :
  - a. pembangunan pertokoan/ruko; dan
  - b. pembangunan pasar.
12. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Pasar Muara Siau meliputi pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan :
  - a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
  - b. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
13. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Sekancing meliputi pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan :
  - a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
  - b. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
14. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Pulau Rengas meliputi pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan :
  - a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
  - b. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan
15. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Lubuk Gaung meliputi pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan :
  - a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
  - b. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
16. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Sungai Ulak meliputi pengembangan



pusat kesehatan skala kecamatan :

- a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
- b. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.

17. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Tigo Alur meliputi pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:

- a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
- b. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.

18. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Rantau Limau Manis meliputi pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan :

- a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
- b. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.

19. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Sungai Bulian meliputi pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan :

- a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
- b. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.

20. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Mensango meliputi pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan :

- a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
- b. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.

21. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Tanjung Rejo meliputi pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan :

- a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
- b. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.

22. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Muara Kibul meliputi pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan :

- a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
- b. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.

23. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa Pembangunan Perkotaan Simpang Parit meliputi pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan :

- a. pengembangan puskesmas rawat inap; dan

- b. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Perumusan isu-isu strategis sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah yang menjadi prioritas dan terarah. Identifikasi isu-isu strategis meningkatkan prioritas pembangunan, dapat diimplementasikan serta dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan kesehatan dimaksudkan agar pelayanan Dinas Kesehatan mampu menyeimbangkan dengan aspek lingkungan dan aspek pengguna layanan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kesehatan dimasa datang. Adapun Isu Strategis Nasional bidang kesehatan tahun 2015 - 2019 yang memerlukan perhatian serius adalah;

1. Peningkatan Status Gizi
2. Peningkatan Status Kesehatan pada setiap kelompok
3. Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
4. Penguatan Sistem Kesehatan
5. Peningkatan akses pelayanan Kesehatan

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 ada beberapa isu strategis dibidang kesehatan

1. Derajat kesehatan masyarakat masih rendah yang ditandai oleh Indeks pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan yang masih terbatas khususnya pedesaan.
3. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan mengalami peningkatan tetapi kualitas pelayanan kesehatan belum meningkat.

Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin sampai dengan akhir tahun 2018 adalah:

1. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan perlindungan kesehatan masyarakat

**Sasaran Strategis 1:** Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit

**Indikator keberhasilan pencapaian sasaran:**

- Persentase penemuan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular
- Persentase Balita Gizi Buruk
- Angka Kematian Ibu (AKI)
- Angka Kematian Bayi (AKB)
- Persentase puskesmas yang terkakreditasi
- Persentase ketersediaan obat dan vaksin
- Persentase pengobatan tradisional yang dibina

**Sasaran Strategis 2:** Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

**Indikator keberhasilan pencapaian sasaran:**

- Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan

2. Meningkatnya lingkungan bersih dan hidup sehat

**Sasaran Strategis:** Peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

**Indikator keberhasilan pencapaian sasaran:**

- Persentase Desa Siaga aktif starta mandiri

3. Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan urusan pemerintahan bidang kesehatan

**Sasaran Strategis 1:** Peningkatan Implementasi SPIP

**Indikator keberhasilan pencapaian sasaran:**

- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan oleh pemeriksa internal dan eksternal

**Sasaran Strategis 2 :** Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi

**Indikator keberhasilan pencapaian sasaran:**

- Nilai Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**

##### **A. Visi Dinas Kesehatan**

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, yaitu: **BERBENAH MENUJU MERANGIN EMAS**, Untuk mencapai visi dari Pemerintah Kabupaten Merangin tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018 menetapkan visi yang berbunyi ; **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT MERANGIN YANG SEHAT DENGAN LAYANAN KESEHATAN MERATA DAN BERKUALITAS”**.

Visi di atas mengandung semangat yang menggambarkan aspirasi dan harapan masyarakat dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Makna strategi berisi beberapa ungkapan yang terkandung di dalam visi tersebut merupakan kondisi yang menggambarkan masyarakat Merangin di masa depan, yakni masyarakat, di tandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, dan memiliki derajat kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, dan memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

##### **B. Misi Dinas Kesehatan**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut agar arah dan tujuan pembangunan dapat terealisasi, maka Dinas Kesehatan Merangin merumuskan misi sebagai berikut Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin yaitu;

1. Meningkatkan upaya kesehatan dan perlindungan kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan urusan pemerintahan bidang kesehatan

## **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan**

### **A. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Tujuan umum dari Pembangunan Kesehatan adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Merangin. Dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem pembiayaan pemeliharaan kesehatan dimasyarakat.

2. Menurunkan kejadian kesakitan dan kematian penyakit menular tertentu dan penyakit tidak menular (degeneratif).
3. Meningkatkan status gizi masyarakat
4. Mengoptimalkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu.
5. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dimasyarakat.
6. Meningkatkan sumber daya kesehatan yang berkualitas.
7. Meningkatkan akses penduduk terhadap lingkungan dan pemukiman sehat
8. Meningkatkan dukungan manajemen kesehatan

Tabel 4.1  
TUJUAN YANG DITETAPKAN UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI

NO	MISI	TUJUAN
1	Meningkatkan upaya kesehatan dan perlindungan kesehatan masyarakat	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan perlindungan kesehatan masyarakat
2	Meningkatkan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat	Meningkatnya lingkungan bersih dan hidup sehat.
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan urusan pemerintahan bidang kesehatan

## **B. SASARAN**

Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan Perumusan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-

hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin sampai dengan akhir tahun 2018 adalah:

Tabel 4.2  
SASARAN YANG DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TUJUAN

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan perlindungan kesehatan masyarakat	1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit	1.Persentase penemuan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular 2.Persentase Balita Gizi Buruk 3.Angka Kematian Ibu (AKI) 4.Angka Kematian Bayi (AKB) 5.Persentase puskesmas yang terkakreditasi 6.Persentase ketersediaan obat dan vaksin 7.Persentase pengobatan tradisional yang dibina
		2. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan
2	Meningkatnya lingkungan bersih dan hidup sehat	Peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Persentase Desa Siaga aktif strata mandiri
3	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Peningkatan implementasi SPIP	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan oleh pemeriksa internal dan eksternal
		Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP Dinas Kesehatan

Tabel 4.3  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

4.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan perlindungan kesehatan masyarakat	1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit	Persentase penemuan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	90%	91%	93%	95%	96%
			Persentase Balita Gizi Buruk	92%	94%	96%	98%	100%
			Angka Kematian Ibu (AKI)	17 kasus	11 kasus	10 kasus	9 kasus	8 kasus
			Angka Kematian Bayi (AKB)	85 kasus	40 kasus	50 kasus	53 kasus	50 kasus
			Persentase puskesmas yang terakreditasi	-	17%	43%	82%	100%
			Persentase ketersediaan obat dan vaksin	90%	92%	93%	94%	95%
			Persentase pengobatan tradisional yang dibina	20%	25%	30%	35%	40%
		2. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	13.2%	24%	41%	67%	85%
2	Meningkatnya lingkungan bersih dan hidup sehat	Peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Persentase Desa Siaga aktif starta mandiri	3%	4%	5%	6%	7%
3	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Peningkatan Implementasi SPIP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan oleh pemeriksa internal dan eksternal	100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan	C	C	B	BB	BB



### C. Penetapan Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 4.4  
STRATEGI YANG DITETAPKAN DALAM RANGKA  
PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN MELALUI KEBIJAKAN DAN  
PROGRAM

No	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Kebijakan
1	1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit	Persentase penemuan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
		Persentase Balita Gizi Buruk	Meningkatkan pelayanan gizi masyarakat	Pendampingan pelayanan gizi masyarakat
		Angka Kematian Ibu (AKI)	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu	Pendampingan pelayanan kesehatan ibu

		Angka Kematian Bayi (AKB)	Peningkatan pelayanan kesehatan anak	Pendampingan pelayanan kesehatan anak
		Persentase puskesmas yang terakreditasi	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan	Meningkatkan Standarisasi pelayanan kesehatan
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin	Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan	Penyediaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat
		Persentase pengobatan tradisional yang dibina	Meningkatkan pembinaan pengobatan tradisional (BATRA)	Penyelenggaraan pembinaan pengobatan tradisional (BATRA)
2	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	Pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin	Penyelenggaraan Kartu Merangin Sehat (KMS)
3	Peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Persentase Desa Siaga aktif strata mandiri	Peningkatan pembinaan desa siaga aktif strata mandiri	Meningkatkan Jumlah Desa Siaga aktif strata mandiri
4	Peningkatan Implementasi SPIP	Persentase Tindak Lanjut Temuan oleh Pemeriksa Internal dan Eksternal	Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Tertib Pengelolaan Keuangan	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan
5	Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan	Implementasi Akuntabilitas Kinerja yang Akuntabel	Menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai dengan Ketentuan

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin tahun 2013- 2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program atau Kegiatan lokalitas SKPD, Program atau Kegiatan Lintas SKPD dan Program atau kegiatan Kewilayahan. Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin sebagai badan perencana mempunyai tugas yang sangat berat terkait dengan makin dinamis dan kompleksnya permasalahan pembangunan. Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin berencana melaksanakan Program dan kegiatan dengan alokasi dan direncanakan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Adapun Rencana program, Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten tahun 2014–2018 dapat dilihat dalam tabel 5.1 di bawah ini ;

Tabel 5.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan  
Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
					Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018					
					Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.
					Vol um e	sat uan		vol um e	sat uan		vol um e	sat uan		Vol um e	sat uan		vol um e	Sat uan		vol um e	Sat uan	
Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan perlindungan kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit	Persentase penemuan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit menular	87	%	457.688.500,00	90	%	482.020.000,00	91	%	507.300.000,00	93	%	534.000.000,00	95	%	574.210.000,00	96	%	878.991.000,71
			889 Penyemprotan /Fogging sarang Nyamuk	Persentase Kejadian DBD yg dilaksanakan Fogging Fokus	90	%	12.860,625.00	91	%	13,537,500.00	92	%	14,250,000.00	93	%	15,000,000.00	94	%	16,130,000.00	95	%	17,737,500.00
			894 Peningkatan Imunisasi	persentase Desa yg mencapai UCI	90	%	6,001,625.00	91	%	6,317,500.00	92	%	6,650,000.00	93	%	7,000,000.00	93	%	7,530,000.00	95	%	8,277,500.00
			900 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Tersedianya Dokumentasi Laporan STP, W1, W2 dan Laporan Investigasi KLB	4	dokumen	17,147,500.00	4	dokumen	18,050,000.00	4	dokumen	19,000,000.00	4	dokumen	20,000,000.00	4	dokumen	21,500,000.00	4	dokumen	23,650,000.00
			904 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Terlaksananya Kegiatan KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	12	Bulan	5,144,250.00	12	Bulan	5,415,000.00	12	Bulan	5,700,000.00	12	Bulan	6,000,000.00	12	Bulan	6,450,000.00	12	Bulan	0,049305556
			909 Pencegahan dan Pengobatan Filariasis	persentase POMP Filariasis	90	%	257,212,000.00	91	%	270,750,000.00	92	%	285,000,000.00	93	%	300,000,000.00	94	%	322,500,000.00	95	%	354,750,000.00

	917 Pencegahan dan Pengobatan TB-Paru	Terlaksananya Kegiatan Penjarangan dan Pemantauan Pengobatan	90	%	51,440,000.00	91	%	54,150,000.00	92	%	57,000,000.00	93	%	60,000,000.00	94	%	64,500,000.00	95	%	70,950,000.00
	923 Pencegahan dan Pengobatan Malaria	API (Annual Parasit Incident)	90	%	51,442,500.00	91	%	54,150,000.00	92	%	57,000,000.00	93	%	60,000,000.00	94	%	64,500,000.00	95	%	70,950,000.00
	928 Pencegahan dan Pengobatan Kusta	RFT Rate	90	%	51,440,000.00	91	%	54,150,000.00	92	%	57,000,000.00	93	%	60,000,000.00	94	%	64,500,000.00	95	%	70,950,000.00
	931 Pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS	RFT Rate	1	%	5,000,000.00	1	%	5,500,000.00	1	%	5,700,000.00	1	%	6,000,000.00	1	%	6,600,000.00	1	%	6,726,000.00
	2143 Penanggulangan P2B2	Terlaksananya penanggulangan P2B2	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	1	Kali	50,000,000.00
	2144 Penanggulangan DBD	Terlaksananya penanggulangan DBD	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	1	Kali	50,000,000.00
	2145 Peningkatan penanggulangan krisis kesehatan dan bencana	Tersedianya Dokumentasi Laporan tata laksana kasus pra dan pasca bencana	0	Dokumen	00.00	0	Dokumen	00.00	0	Dokumen	00.00	0	Dokumen	00.00	0	Dokumen	00.00	1	Dokumen	100,000,000.00
	2300 Peningkatan Penemuan kasus ISPA dan Pneumonia	Terlaksananya kegiatan penjarangan dan pemantauan pengobatan	0	%	00.00	0	%	00.00	0	%	00.00	0	%	00.00	0	%	00.00	90	%	20,000,000.00
	2303 Pencegahan dan pengobatan Penyakit Hepatitis	terlaksananya kegiatan penjarangan dan skrining hepatitis	0	%	.00	0	%	00.00	0	%	00.00	0	%	00.00	0	%	00.00	85	%	20,000,000.00
	2299 Pencegahan dan Pengobatan Diare	Terlaksananya kegiatan penjarangan dan pemantauan pengobatan Diare	0	%	00.00	0	%	00.00	0	%	00.00	0	%	00.00	0	%	00.00	85	%	15,000,000.00
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Cakupan Penanganan Penyakit tidak Menular	95	%	.00	0	%	0	0	%	0	0	%	0	95	%	300.000.000,00	96	%	500.000.000,00
	2146 Pengendalian PTM di Faskes Dasar	Terlaksananya kegiatan pengendalian PTM	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	1	Kali	300,000,000.00	1	Kali	500,000,000.00
Persentase Balita Gizi Buruk	Program Perbaikan Gizi masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	88	%	203.528.443,86	92	%	193.608.888,22	94	%	220.114.617,60	96	%	205.668.017,60	98	%	392.613.178,60	100	%	426.874.495,46
	1373 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Peta informasi masyarakat kurang gizi	1	Dokumen	0,726388889	1	Dokumen	17,22	1	Dokumen	0,75	1	Dokumen	0,75	1	Dokumen	0,791666667	1	Dokumen	19,46

	1374 pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah Posyandu yang diberikan bantuan tambahan makanan	391	pos yandu	128,606,250.00	395	pos yandu	135,375,000.00	400	pos yandu	142,500,000.00	405	pos yandu	150,000,000.00	410	pos yandu	311,250,000.00	415	pos yandu	342,375,000.00
	1375 Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Terseleenggaranya Penanggulangan KEP, Anemia Gizi besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya	1	kali	19,209,065.00	1	kali	1,693,753.00	1	kali	20,203,950.00	1	kali	20,741,000.00	1	kali	21,600,000.00	1	kali	22,760,000.00
	1376 Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk bagi Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan	Terlaksananya Pelatihan Tatalaksana Gizi Puskesmas	1	kali	30,568,862.00	1	kali	31,125,118.00	1	kali	31,710,650.00	1	kali	32,327,000.00	1	kali	33,313,160.00	1	kali	34,644,476.00
	1377 Perlombaan Lomba Balita Indonesia	Terlaksananya Lomba Balita Sehat TK. Kabupaten/Kota dan Provinsi	1	kali	25,144,250.00	1	kali	25,415,000.00	1	kali	25,700,000.00	1	kali	2,600,000.00	1	kali	26,450,000.00	1	kali	27,095,000.00
Anka Kematian Ibu (AKI)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Angka Kematian Ibu (AKI)	18	Kasus	5.327.731.386,00	14	Kasus	247.282.500,00	11	Kasus	260.300.000,00	9	Kasus	271.000.000,00	7	Kasus	294.555.000,00	6	Kasus	253.052.500,71
	977 Pelatihan Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK dan HPP)	Terseleenggaranya Pelatihan Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK dan HPP)	1	Kali	10,288,500.00	1	Kali	10,830,000.00	1	Kali	11,400,000.00	1	Kali	12,000,000.00	1	Kali	12,900,000.00	1	Kali	14,190,000.00
	980 Pertemuan Audit Maternal Perinatal	Terlaksananya Pertemuan Audit Maternal Perinatal	1	Kali	10,288,500.00	1	Kali	10,830,000.00	1	Kali	11,400,000.00	1	Kali	12,000,000.00	1	Kali	12,900,000.00	1	Kali	4,190,000.00
	984 Pertemuan Integrasi Program KIA Lintas Program	Terlaksananya Pertemuan Integrasi Program KIA Lintas Program	1	Kali	4,290,000.00	1	Kali	4,510,000.00	1	Kali	4,750,000.00	1	Kali	5,000,000.00	1	Kali	5,380,000.00	1	Kali	5,910,000.00
	987 Sosialisasi dan Penguatan Pelaksanaan P4K	Terlaksananya Peningkatan Presentase Cakupan Persalinan LINAKES dai Faskes	1	Kali	51,442,500.00	1	Kali	54,150,000.00	1	Kali	57,000,000.00	1	Kali	60,000,000.00	1	Kali	64,500,000.00	1	Kali	0,04930556
	989 Pertemuan Manajemen PWS KIA dalam Peningkatan KIA	terlaksananya Pertemuan Manajemen PWS KIA dalam Peningkatan KIA	1	Kali	51,442,500.00	1	Kali	54,150,000.00	1	Kali	57,000,000.00	1	Kali	60,000,000.00	1	Kali	64,500,000.00	1	Kali	70,950,000.00

Anka Kematian Bayi (AKB)	993 Peningkatan kapasitas Bidan dalam Penanganan Asfiksia pada BBL dan BBLR	Terlaksananya Peningkatan kapasitas Bidan dalam Penanganan Asfiksia pada BBL dan BBLR	1	Kali	5,144,250,011.00	1	Kali	54,150,000.00	1	Kali	57,000,000.00	1	Kali	57,000,000.00	1	Kali	64,500,000.00	1	Kali	70,950,000.00
	996 Investigasi Kematian Ibu dan Neonatal	terlaksananya Investigasi Kematian Ibu dan Neonatal	98	%	12,860,625.00	98	%	13,537,500.00	99	%	14,250,000.00	100	%	15,000,000.00	100	%	16,125,000.00	100	%	17,737,500.00
	998 Pertemuan Kapasitas Bidan dalam Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan KIBLA dan SDIDTK	terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan KIBLA dan SDIDTK	2	Kali	12,860,625.00	2	Kali	13,537,500.00	2	Kali	14,250,000.00	2	Kali	15,000,000.00	2	Kali	16,125,000.00	2	Kali	17,737,500.00
	1000 Pelatihan Tatalaksana MTBM dan MTBS bagi Bidan di Desa	terlaksananya Pelatihan Tatalaksana MTBM dan MTBS bagi Bidan di Desa	98	%	12,860,625.00	98	%	13,537,500.00	99	%	14,250,000.00	100	%	15,000,000.00	100	%	16,125,000.00	100	%	17,737,500.00
	1002 Belanja Cetak Instrumen Mnjajemen Program KIA	jumlah Cetakan Instrumen Mnjajemen Program KIA	3	Jenis	17,147,500.00	3	Jenis	18,050,000.00	3	Jenis	19,000,000.00	4	Jenis	20,000,000.00	4	Jenis	21,500,000.00	4	Jenis	23,650,000.00
Persentase ketersediaan obat dan vaksin	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan	68	%	2.370.422.467,00	70	%	2.565.665.755,00	73	%	3.142.941.150,00	82	%	4.620.344.407,00	86	%	4.898.834.649,00	90	%	5.757.923.113,00
	1030 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Terlaksananya Pertemuan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	2	Kali	19,719,625.00	2	Kali	20,757,500.00	2	Kali	21,850,000.00	2	Kali	23,000,000.00	2	Kali	24,725,000.00	2	Kali	27,197,500.00
	1033 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan termasuk obat generik esensial	Jumlah Peralatan dan Perbekalan Kesehatan termasuk obat generik esensial	2	Unit	300,081,250.00	2	Unit	315,875,000.00	3	Unit	332,500,000.00	3	Unit	350,000,000.00	4	Unit	376,250,000.00	4	Unit	413,875,000.00
	1034 Peningkatan Kesehatan Masyarakat	adanya Pertemuan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan masyarakat	2	Kali	12,860,625.00	2	Kali	13,537,500.00	2	Kali	14,250,000.00	2	Kali	15,000,000.00	2	Kali	16,125,000.00	2	Kali	17,737,500.00
	1039 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas	adanya Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Pustu	12	Bulan	1,714,750,000.00	12	Bulan	1,805,000,000.00	12	Bulan	1,900,000,000.00	12	Bulan	2,000,000,000.00	12	Bulan	2,150,000,000.00	12	Bulan	2,365,000,000.00
	1040 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program dan Kegiatan	Jumlah Puskesmas dilakukan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program dan	22	Puskesmas	19,719,625.00	23	Puskesmas	20,757,500.00	24	Puskesmas	21,850,000.00	24	Puskesmas	23,000,000.00	25	Puskesmas	24,725,000.00	26	Puskesmas	27,197,500.00

	Kegiatan																		
1042 Lomba Medis dan Para Medis Teladan	Jumlah Lomba Medis dan Para Medis Teladan yang dilaksanakan	2	Kali	13,718,000.00	2	Kali	14,440,000.00	2	Kali	15,200,000.00	2	Kali	16,000,000.00	2	Kali	17,200,000.00	2	Kali	18,920,000.00
1043 Lomba Puskesmas Berpestasi	Jumlah Lomba Puskesmas Berpestasi yang dilaksanakan	2	Kali	10,288,500.00	2	Kali	10,830,000.00	2	Kali	11,400,000.00	2	Kali	12,000,000.00	2	Kali	12,900,000.00	2	Kali	14,190,000.00
1045 Revitalisasi Program Public Health Nurse (PHN)	Terlaksananya Pertemuan Revitalisasi Program Public Health Nurse (PHN)	1	Kali	10,288,500.00	1	Kali	10,830,000.00	1	Kali	11,400,000.00	1	Kali	12,000,000.00	1	Kali	12,900,000.00	1	Kali	14,190,000.00
1046 Penyelenggaraan Kesehatan Jamaah Haji	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan calon Haji	1	Kali	7,716,375.00	1	Kali	8,122,500.00	1	Kali	8,550,000.00	1	Kali	9,000,000.00	1	Kali	9,675,000.00	1	Kali	10,642,500.00
1049 Lomba LCT/Dokter Kecil	Jumlah Lomba LCT/Dokter Kecil diadakan	1	Kali	11,145,875.00	1	Kali	11,732,500.00	1	Kali	12,350,000.00	1	Kali	13,000,000.00	1	Kali	13,975,000.00	1	Kali	15,372,500.00
1052 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan PWS KIA	adanya Pertemuan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	1	Kali	18,862,250.00	1	Kali	19,855,000.00	1	Kali	20,900,000.00	1	Kali	22,000,000.00	1	Kali	23,650,000.00	1	Kali	26,015,000.00
1053 Sosialisasi dan pembentukan jejaring puskesmas mampu KTP/A	Terseleenggaranya Peningkatan Kompetensi Nakes Mampu Tatalaksana KTP/A	1	Kali	6,859,000.00	1	Kali	7,220,000.00	1	Kali	7,600,000.00	1	Kali	8,000,000.00	1	Kali	8,600,000.00	1	Kali	9,460,000.00
1059 Revitalisasi Program Kesehatan Jiwa (Keswa)	Terlaksananya Revitalisasi Program Kesehatan Jiwa (Keswa)	12	Bulan	104,412,842.00	12	Bulan	109,908,255.00	12	Bulan	115,692,900.00	12	Bulan	121,782,000.00	12	Bulan	130,306,000.00	12	Bulan	143,336,600.00
1061 penyediaan operasional UPTD farmasi dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya penyediaan operasional UPTD farmasi dan perbekalan kesehatan	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	6,000,000.00	12	Bulan	6,600,000.00	12	Bulan	76,862,500.00
1063 penyediaan operasional UPTD Labkesda	terlaksananya penyediaan operasional UPTD Labkesda	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	6,000,000.00	12	Bulan	6,600,000.00	12	Bulan	76,862,500.00
1071 Penyediaan operasional puskesmas puskesmas Bangko	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Bangko	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	238,615,000.00	12	Bulan	107,761,500.00	12	Bulan	118,537,650.00
1084 Penyediaan operasional puskesmas Pematang Kandis	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pematang Kandis	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	57,000,875.00	12	Bulan	62,700,963.00	12	Bulan	68,971,059.00



1085	Penyediaan operasional puskesmas Rantau Panjang	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Rantau Panjang	0	Bulan	R0.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	135,729,407.00	12	Bulan	149,302,348.00	12	Bulan	164,232,582.00
1087	Penyediaan operasional puskesmas Muara Delang	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Delang	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	197,450,000.00	12	Bulan	217,195,000.00	12	Bulan	238,914,500.00
1088	Penyediaan operasional puskesmas Sungai Bulian	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sungai Bulian	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	65,742,700.00	12	Bulan	72,316,970.00	12	Bulan	79,548,667.00
1090	Penyediaan operasional puskesmas Muara Siau	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Siau	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	69,700,000.00	12	Bulan	76,670,000.00	12	Bulan	84,337,000.00
1092	Penyediaan operasional puskesmas Pasar Masurai	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pasar Masurai	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	85,961,875.00	12	Bulan	94,558,063.00	12	Bulan	104,013,869.00
1094	Penyediaan operasional puskesmas Sungai Manau	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sungai Manau	0	Bulan	00.00	0	Bulan	0.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	88,200,000.00	12	Bulan	97,020,000.00	12	Bulan	106,722,000.00
1096	Penyediaan operasional puskesmas Simpang Parit	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Simpang Parit	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	37,012,500.00	12	Bulan	40,713,750.00	12	Bulan	44,785,125.00
1097	Penyediaan operasional puskesmas Muara Deras	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Deras	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	114,265,000.00	12	Bulan	125,691,500.00	12	Bulan	138,260,650.00
1099	Penyediaan operasional puskesmas Meranti	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Meranti	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	89,162,500.00	12	Bulan	98,078,750.00	12	Bulan	107,886,625.00
1101	Penyediaan operasional puskesmas Pamenang	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pamenang	0	Bulan	00.00	0	Bulan	0.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	122,400,000.00	12	Bulan	134,640,000.00	12	Bulan	148,104,000.00
1102	Penyediaan operasional puskesmas Muara Jernih	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Jernih	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	60,610,000.00	12	Bulan	66,671,000.00	12	Bulan	73,338,100.00
1103	Penyediaan operasional puskesmas Sumber Agung	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sumber Agung	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	42,757,800.00	12	Bulan	47,033,580.00	12	Bulan	51,736,938.00
1104	Penyediaan operasional puskesmas Muara Kibul	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Kibul	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	32,400,000.00	12	Bulan	35,640,000.00	12	Bulan	39,204,000.00

1105	Penyediaan operasional puskesmas Rantau Suli	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Rantau Suli	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	32,400,000.00	12	Bulan	35,640,000.00	12	Bulan	39,204,000.00
1107	Penyediaan operasional puskesmas Rantau Limau Manis	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Rantau Limau Manis	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	32,898,000.00	12	Bulan	36,187,800.00	12	Bulan	39,806,580.00
1109	Penyediaan operasional puskesmas Sungai Jernih	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sungai Jernih	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	32,400,000.00	12	Bulan	35,640,000.00	12	Bulan	39,204,000.00
1110	Penyediaan operasional puskesmas Batang Masumai	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Batang Masumai	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	32,400,000.00	12	Bulan	35,640,000.00	12	Bulan	39,204,000.00
1113	Penyediaan operasional puskesmas Sekancing	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sekancing	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	37,011,750.00	12	Bulan	40,712,925.00	12	Bulan	44,784,218.00
1114	Penyediaan operasional puskesmas Pemenang Barat	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pamenang Barat	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	50,895,000.00	12	Bulan	55,984,500.00	12	Bulan	61,582,950.00
1116	Penyediaan operasional puskesmas Nalo Tantan	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Nalo Tantan	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	30,150,000.00	12	Bulan	33,165,000.00	12	Bulan	36,481,500.00
1118	Penyediaan operasional puskesmas Pasar Baru	terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pasar Baru	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	32,400,000.00	12	Bulan	35,640,000.00	12	Bulan	39,204,000.00
1120	Pengembangan sistem informasi kesehatan	terlaksananya pengembang sistem informasi kesehatan	12	Bulan	100,000,000.00	12	Bulan	125,000,000.00	12	Bulan	150,000,000.00	12	Bulan	200,000,000.00	12	Bulan	250,000,000.00	12	Bulan	300,000,000.00
1121	Penyusunan profil dinas kesehatan	tersusunnya profil dinas kesehatan	1	Dokumen	20,000,000.00	1	Dokumen	22,000,000.00	1	Dokumen	24,200,000.00	1	Dokumen	26,000,000.00	1	Dokumen	30,000,000.00	1	Dokumen	33,000,000.00
2134	Penyediaan operasional puskesmas Kota Raja	Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	50,000,000.00
2135	Penyediaan operasional puskesmas Tambang Emas	Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	50,000,000.00
2136	Penyediaan operasional puskesmas	Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	50,000,000.00

	Tabir Lintas																		
	2137 Penyediaan operasional puskesmas bangko barat	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	0.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	50,000,000.00
	2138 Revitalisasi Sistem Kesehatan	0	Kali	00.00	1	Kali	49,800,000.00	5	Kali	475,198,250.00	1	Kali	40,000,000.00	1	Kali	50,000,000.00	1	Kali	60,000,000.00
	Program Peningkatan Pelayanan kesehatan Lansia	40	%	12.860.625,00	45	%	13.537.500,00	46	%	14.250.000,00	45	%	15.000.000,00	50	%	16.130.000,00	53	%	17.737.500,00
	1158 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	140	Lansia	12,860,625.00	145	Lansia	13,537,500	150	Lansia	14,250,000.00	155	Lansia	15,000,000.00	160	Lansia	16,130,000.00	165	Lansia	17,737,500.00
Jumlah puskesmas yang terakreditasi	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		IKMC	128.606.250,00		IKMC	92.640.000,00		IKM	97.800.000,00		IKMB	157.000.000,00		IKMB	110.900.000,00		IKMB	986.520.000,00
	1106 Perhitungan DHA (Districh Healt Account)	1	dokumen	25,721,250.00	1	dokumen	27,075,000.00	1	dokumen	28,500,000.00	1	dokumen	30,000,000.00	1	Dokumen	32,250,000.00	1	dokumen	35,475,000.00
	1108 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	5	dokumen	51,442,500.00	5	dokumen	54,150,000.00	5	dokumen	57,000,000.00	5	dokumen	60,000,000.00	5	Dokumen	64,500,000.00	5	dokumen	70,950,000.00
	1111 Akreditasi Puskesmas	5	Puk esmas	51,442,500.00	5	puk esmas	5,415,000.00	5	puk esmas	5,700,000.00	5	puk esmas	60,000,000.00	5	puk esmas	6,450,000.00	5	puk esmas	7,095,000.00
	1115 Standar Pelayanan Minimum	0	Dokumen	00.00	0	dokumen	00.00	0	dokumen	00.00	0	dokumen	00.00	0	Dokumen	00.00	1	dokumen	17,000,000.00
	2006 Pemantauan dan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan	0	Kali	00.00	23	Kali	6,000,000.00	23	Kali	6,600,000.00	23	Kali	7,000,000.00	25	Kali	7,700,000.00	27	Kali	9,000,000.00
	2007 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	1	Kali	262,000,000.00
	2148 Public Safety Center	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	1	Kali	500,000,000.00
	2301 Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Kabupaten	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	1	Kali	15,000,000.00

	2302 Peningkatan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Non Pemerintah	Persentase fasilitas kesehatan yang tertib administrasi Faskes	0	%	00.00	0	%	00.00	0	%	00.00	0	%	00.00	0	%	00.00	85	%	20,000,000.00
	2305 Persiapan akreditasi Puskesmas	Terwujudnya akreditasi puskesmas	0	%	00.00	0	%	00.00	0	%	00.00	0	%	00.00	0	%	00.00	90	%	50,000,000.00
	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Dasar	Jumlah Puskesmas Perawatan dan non perawatan	10 dan 11		0	10 dan 11		0	10 dan 13		302.500.000,00	12 dan 13		##### ##	14 dan 13		##### ##	17 dan 10		19.532.214.500,00
	1011 Peningkatan Puskesmas (DAK)	Terlaksananya peningkatan Puskesmas	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	1	Unit	2,473,000,000.00	5	Unit	6,000,000,000.00	3	Unit	4,000,000,000.00
	1012 Perbaikan Puskesmas (DAK)	Jumlah Puskesmas yang direhab	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	3	Unit	1,500,000,000.00	3	Unit	1,650,000,000.00
	1015 Perluasan Puskesmas (DAK)	Jumlah Puskesmas yang dilakukan perluasan	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	3	Unit	600,000,000.00	3	Unit	700,000,000.00
	1017 Pengadaan peralatan Kesehatan (DAK)	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan	0	Paket	00.00	0	paket	00.00	0	paket	00.00	10	paket	3,000,000,000.00	10	paket	3,300,000,000.00	10	paket	3,630,000,000.00
	1020 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	0	Paket	00.00	0	paket	00.00	0	paket	00.00	0	paket	00.00	1	paket	500,000,000.00	1	paket	550,000,000.00
	1023 Pengadaan Peralatan sistem informasi kesehatan (SIK)	tersedianya peralatan sistem informasi kesehatan (SIK)	0	Paket	00.00	0	paket	00.00	0	paket	00.00	1	paket	556,000,000.00	1	paket	611,600,000.00	1	paket	672,760,000.00
	1026 Pembangunan Puskesmas (DAK)	Jumlah puskesmas yang dibangun	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	1	Unit	3,371,450,000.00	2	Unit	9,000,000,000.00	1	Unit	4,079,454,500.00
	1028 Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah IPAL	Jumlah puskesmas yang memiliki IPAL	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	5	Unit	2,500,000,000.00	5	Unit	2,750,000,000.00
	1851 Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling (DAK)	Tersedianya Puskesmas Keliling	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	1	Unit	302,500,000.00	30	Unit	1,286,250,000.00	33	Unit	3,178,050,000.00	3	Unit	1,500,000,000.00

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Non Fisik	Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan	75	%	0	80	%	.000	85	%	0	90	%	##### ##	100	%	##### ##	100	%	21.810.112.958,00
46 Jaminan Persalinan (Jampersal)	terlaksananya operasional puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	80	Bulan	7,883,315,020.00	85	Bulan	8,671,646,522.00	90	Bulan	9,538,811,174.00
50 dukungan manajemen bantuan operasional kesehatan (BOK) Kabupaten	terselenggaranya penyediaan jampersal	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	3,133,315,020.00	12	Bulan	3,446,646,522.00	12	Bulan	3,791,311,174.00
51 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Bangko	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	226,871,000.00	12	Bulan	249,558,100.00	12	Bulan	274,513,910.00
60 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Pematang Kandis	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	.000	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	203,452,000.00	12	Bulan	223,797,200.00	12	Bulan	246,176,920.00
62 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Rantau Panjang	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	199,851,000.00	12	Bulan	219,836,100.00	12	Bulan	241,819,710.00
65 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Muara Delang	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	213,393,000.00	12	Bulan	234,732,300.00	12	Bulan	258,205,530.00
67 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Sungai Bulian	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	.000	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	141,089,000.00	12	Bulan	155,197,900.00	12	Bulan	170,717,690.00
69 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Muara Siau	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	236,394,000.00	12	Bulan	260,033,400.00	12	Bulan	286,036,740.00
70 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Pasar Masurai	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	235,691,000.00	12	Bulan	259,260,100.00	12	Bulan	285,186,110.00
72 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Sungai Manau	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	188,195,000.00	12	Bulan	207,014,500.00	12	Bulan	227,715,950.00

73 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Sumpang Parit	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	191,339,000.00	12	Bulan	210,472,900.00	12	Bulan	231,520,190.00
74 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Muara Madras	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	90	Bulan	231,257,000.00	90	Bulan	254,382,700.00	90	Bulan	279,820,970.00
76 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Meranti	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	90	Bulan	232,227,000.00	90	Bulan	255,449,700.00	90	Bulan	280,994,670.00
78 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Pamenang	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	90	Bulan	235,498,000.00	90	Bulan	259,047,800.00	90	Bulan	284,952,580.00
80 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Muara Jernih	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	Rp.0.00	90	Bulan	141,023,000.00	90	Bulan	155,125,300.00	90	Bulan	170,637,830.00
81 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Sumber Agung	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	90	Bulan	174,931,000.00	90	Bulan	192,424,100.00	90	Bulan	211,666,510.00
82 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Muara Kibul	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	213,393,000.00	12	Bulan	234,732,300.00	12	Bulan	258,205,530.00
83 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Sekancig	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	90	Bulan	117,896,000.00	90	Bulan	129,685,600.00	90	Bulan	142,654,160.00
84 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Rantau Limau Manis	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	90	Bulan	249,366,000.00	90	Bulan	274,302,600.00	90	Bulan	301,732,860.00
85 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Sungai Jering	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	90	Bulan	137,100,000.00	90	Bulan	150,810,000.00	90	Bulan	165,891,000.00

86 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Batang Masumai	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	90	Bulan	163,490,000.00	90	Bulan	179,839,000.00	90	Bulan	197,822,900.00
87 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Pamenang Barat	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	90	Bulan	153,230,000.00	90	Bulan	168,553,000.00	90	Bulan	185,408,300.00
88 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Rantau Suli	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	90	Bulan	226,358,000.00	90	Bulan	248,993,800.00	90	Bulan	273,893,180.00
89 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Nalo Tantan	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	90	Bulan	123,960,000.00	90	Bulan	136,356,000.00	90	Bulan	149,991,600.00
90 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Pasar Baru	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	90	Bulan	185,527,000.00	90	Bulan	204,079,700.00	90	Bulan	224,487,670.00
2126 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Kota Raja	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	300,000,000.00
2127 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kesehatan masyarakat	Terlaksananya Operasional Bidang	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	200,000,000.00	12	Bulan	300,000,000.00
2128 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Tambang Emas	Terlaksananya Operasional Puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	200,000,000.00	12	Bulan	300,000,000.00
2129 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) P2P	Terlaksananya Operasional Bidang	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	170,000,000.00	12	Bulan	180,000,000.00
2130 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Operasional Bidang	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	132,920,000.00	12	Bulan	150,000,000.00
2131 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang sumber daya da informasi	Terlaksananya Operasional Bidang	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	130,000,000.00	12	Bulan	140,000,000.00

	kesehatan																		
	2132 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Tabir Lintas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	299,938,100.00
	2133 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Bangko Barat	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	300,000,000.00
	2149 Distribusi Obat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	120,000,000.00	12	Bulan	20,000,000.00
	2150 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) LABKESDA	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	100,000,000.00	12	Bulan	120,000,000.00
	2151 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD Farmasi	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	100,000,000.00	12	Bulan	120,000,000.00
	2152 Akreditasi Puskesmas	0	Puskesmas	00.00	0	Puskesmas	00.00	0	Puskesmas	00.00	0	Puskesmas	00.00	0	Puskesmas	00.00	6	Puskesmas	900,000,000.00
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	77	%	8.945.225.00	84	%	9.505.500.000.00	88	%	8.190.000.00	90	%	##### ##	96	%	##### ##	100	%	14.905.125.000.00
	949 Pembangunan Puskesmas Tanpa Rawat Inap + Rumah Dinas	1	unit	1,028,850.00	1	unit	1,083,000,000.00	1	unit	1,140,000,000.00	1	unit	1,200,000,000.00	1	unit	1,290,000,000.00	1	unit	1,419,000,000.00
	958 Pembangunan Puskesmas Pembantu/Poskesdes	5	unit	1,714,750.00	7	unit	1,805,000,000.00	9	unit	1,900,000,000.00	11	unit	2,000,000,000.00	13	unit	2,150,000,000.00	15	unit	2,365,000,000.00
	960 Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling (R 4) (DAU)	1	unit	257,212,500.00	1	unit	270,750,000.00	1	unit	285,000,000.00	1	unit	30,000,000.00	1	unit	322,500,000.00	1	unit	354,750,000.00



		963 Pengadaan Alkes / Penunjang di PRI dan PNRI (DAK)	Jenis Alkes/penunjang yang diadakan	120	jenis	3,258,025.00	125	jenis	3,429,500,000.00	130	jenis	3,610,000,000.00	135	jenis	3,800,000,000.00	140	jenis	4,085,000,000.00	145	jenis	4,493,500,000.00
		965 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	Terseenggaranya Rehab Puskesmas Pembantu	10	unit	643,031,250.00	10	unit	676,875,000.00	10	unit	712,500,000.00	10	unit	.075	15	unit	2,500,000,000.00	10	unit	1,091,000,000.00
		970 Master Plan dan perhitungan pembangunan sarana kesehatan	Terlaksananya penyusunan dokumen konsultan perencanaan	0	dok	00.00	0	dok	00.00	0	dok	00.00	10	dok	800,000,000.00	10	dok	495,000,000.00	10	dok	539,500,000.00
		1369 pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas	terlaksananya pemeliharaan	4	unit	1,714,750,000.00	4	unit	1,805,000,000.00	4	unit	0,104166667	4	unit	2,000,000,000.00	4	unit	2,150,000,000.00	4	unit	2,365,000,000.00
		1400 Pembangunan Posyandu	Jumlah Posyandu yang di bangun	2	Unit	128,606,250.00	2	Unit	135,375,000.00	2	Unit	142,500,000.00	2	Unit	150,000,000.00	2	Unit	161,250,000.00	3	Unit	177,375,000.00
		2147 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas	Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas	6	Unit	200,000,000.00	7	Unit	300,000,000.00	8	Unit	400,000,000.00	9	Unit	800,000,000.00	10	Unit	1,000,000,000.00	11	Unit	1,100,000,000.00
		2308 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	1	Unit	500,000,000.00
		2309 Rehab sedang berat Puskesmas	Terlaksananya rehab Puskesmas	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	1	Unit	500,000,000.00
Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Masyarakat	70	%	0	73	%	0	78	%	0	85	%	390.282.310,00	87	%	450.000.000,00	93	%	495.000.000.00
		1403 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Merangin Sehat	Terseenggaranya pemberian jaminan merangin sehat	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	390,282,310.00	12	Bulan	450,000,000.00	12	Bulan	495,000,000.00
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	62	%	8.786.379.00	67	%	9.248.820.000.00	71	%	9.735.600.000.00	78	%	#####	83	%	#####	95	%	12.137.180.000,00
		93 Pengelolaan Dana Non Kapitasi BPJS Puskesmas (Bersumber PAD Non Kapitasi BPJS_JKN)	Terlaksananya Pengelolaan Dana Non Kapitasi BPJS Puskesmas	4	Kali	1,028,850,000.00	4	Kali	1,083,000,000.00	4	Kali	1,140,000,000.00	4	Kali	1,200,000,000.00	4	Kali	1,290,000,000.00	4	Kali	1,419,000,000.00

		94 Pertemuan Pemantapan Pelaksanaan JKN, KMS dan Samisake Tk. Kabupaten	Terlaksananya pertemuan pelaksanaan program Jamkes	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	1	Kali	8,000,000.00	1	Kali	8,600,000.00	1	Kali	9,460,000.00
		96 Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan JKN, KMS dan Samisake Tk. Kabupaten	Terlaksananya pertemuan pelaksanaan program Jamkes	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	1	Kali	8,000,000.00	1	Kali	8,600,000.00	1	Kali	9,460,000.00
		97 Pengelolaan dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan (Bersumber PAD Kapitasi BPJS_JKN)	Terlaksananya Pengelolaan dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan	12	Bulan	5,144,250.00	12	Bulan	5,415,000,000.00	12	Bulan	5,700,000,000.00	12	Bulan	6,000,000,000.00	12	Bulan	6,450,000,000.00	12	Bulan	7,095,000,000.00
		98 Pembiayaan program Kartu Merangin Sehat (KMS)	Terlaksananya pembiayaan program KMS	12	Bulan	857,375.00	12	Bulan	902,500,000.00	12	Bulan	950,000,000.00	12	Bulan	1,000,000,000.00	12	Bulan	1,075,000,000.00	12	Bulan	1,182,500,000.00
		100 Pembiayaan program Samisake	Terlaksananya pembiayaan program Samisake	12	Bulan	1,749,045.00	12	Bulan	1,841,100,000.00	12	Bulan	1,938,000,000.00	12	Bulan	2,040,000,000.00	12	Bulan	2,193,000,000.00	12	Bulan	2,412,300,000.00
		102 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program JKN dan Jamkesda	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program JKN	12	Bulan	6,859,000.00	12	Bulan	7,220,000.00	12	Bulan	7,600,000.00	12	Bulan	8,000,000.00	12	Bulan	8,600,000.00	12	Bulan	9,460,000.00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	Program Merangin sehat	Jumlah Masyarakat Miskin mendapat Jaminan Kesehatan	725	Orang	857.375.000.00	725	Orang	902.500.000.00	198	Orang	950.000.000.00	229	Orang	1.000.000.000.00	461	Orang	1.075.000.000.00	482	Orang	1.182.500.000.00
		2248 Pembiayaan program Kartu Merangin Sehat (KMS)	Terlaksananya pembiayaan program KMS	12	Bulan	857,375.00	12	Bulan	902,500,000.00	12	Bulan	950,000,000.00	12	Bulan	1,000,000,000.00	12	Bulan	1,075,000,000.00	12	Bulan	1,182,500,000.00
		Program Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase pelayanan kesehatan yang mendapatkan jaminan kesehatan	75	%	0	80	%	0	85	%	0	90	%	7.464.823.487.00	95	%	8.211.305.834.00	100	%	9.632.436.420.00
		776 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Bangko	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	877,314,151.00	12	Bulan	965,045,566.00	12	Bulan	1,061,550,123.00
		777 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pematang Kandis	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	428,062,849.00	12	Bulan	470,869,134.00	12	Bulan	517,956,047.00
		778 Pengelola Dana KapitasiBPJS Puskesmas Muara Delang	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	438,657,201.00	12	Bulan	482,522,921.00	12	Bulan	530,775,213.00

779 Pengelola Dana KapitasiBPJS Puskesmas Rantau Panjang	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	360,000,000.00	12	Bulan	396,000,000.00	12	Bulan	435,600,000.00
780 Pengelola Dana KapitasiBPJS Puskesmas Sungai Bulian	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	107,093,520.00	12	Bulan	117,802,872.00	12	Bulan	129,583,159.00
781 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Siau	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	459,000,000.00	12	Bulan	504,900,000.00	12	Bulan	555,390,000.00
782 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pasar Masurai	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	590,228,076.00	12	Bulan	649,250,884.00	12	Bulan	714,175,972.00
784 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Manau	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	306,000,000.00	12	Bulan	336,600,000.00	12	Bulan	370,260,000.00
785 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Simpang Parit	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	170,641,474.00	12	Bulan	187,705,621.00	12	Bulan	206,476,184.00
786 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Madras	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	219,586,633.00	12	Bulan	241,545,296.00	12	Bulan	265,699,826.00
792 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Meranti	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	382,500,000.00	12	Bulan	420,750,000.00	12	Bulan	462,825,000.00
793 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pamenang	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	612,000,000.00	12	Bulan	673,200,000.00	12	Bulan	740,520,000.00
794 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Jernih	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	459,000,000.00	12	Bulan	504,900,000.00	12	Bulan	555,390,000.00
798 Pengelola Dana KapitasiBPJS Puskesmas Sumber Agung	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	179,486,294.00	12	Bulan	197,434,923.00	12	Bulan	217,178,416.00
802 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Kibul	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	219,586,633.00	12	Bulan	241,545,296.00	12	Bulan	265,699,826.00
809 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Suli	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	159,025,182.00	12	Bulan	174,927,700.00	12	Bulan	192,420,470.00

815 Pengelola Dana KapitasiBPJS Puskesmas Sekancing	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	306,000,000.00	12	Bulan	336,600,000.00	12	Bulan	370,260,000.00
818 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pasar Baru	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	153,000,000.00	12	Bulan	168,300,000.00	12	Bulan	185,130,000.00
820 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Limau Manis	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	170,641,474.00	12	Bulan	187,705,621.00	12	Bulan	206,476,184.00
825 Pengelola Dana KapitasiBPJS Puskesmas Sungai Jering	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	153,000,000.00	12	Bulan	168,300,000.00	12	Bulan	185,130,000.00
829 Pengelola Dana KapitasiBPJS Puskesmas Batang Masumai	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	153,000,000.00	12	Bulan	168,300,000.00	12	Bulan	185,130,000.00
832 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pamenang Barat	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	306,000,000.00	12	Bulan	336,600,000.00	12	Bulan	370,260,000.00
835 Pengelola DanaKapitasi BPJS Puskesmas Nalo Tantan	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	255,000,000.00	12	Bulan	280,500,000.00	12	Bulan	308,550,000.00
2139 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Kota Raja	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	150,000,000.00
2140 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Tambang Emas	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	150,000,000.00
2141 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Tabir Lintas	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	150,000,000.00
2142 Pengelola Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Bangko Barat	Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	0	Bulan	00.00	12	Bulan	150,000,000.00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	85	%	8.826.118.331,00	90	%	9.290.650.875,00	92	%	9.779.632.500,00	94	%	##### ##	96	%	##### ##	100	%	13.688.743.875,00
1150 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	12	bulan	8.757.528,331,00	12	bulan	9,218,450,875,00	12	bulan	9,703,632,500,00	12	bulan	10,214,350,000,00	12	bulan	10,980,426,250,00	12	bulan	12,078,468,875,00

	1151	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	20	pus kes mas	38,581,875.00	21	pus kes mas	40,612,500.00	22	pus kes mas	42,750,000.00	23	pus kes mas	45,000,000.00	24	pus kes mas	47,250,000.00	25	pus kes mas	51,975,000.00
	1152	peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	12	bula n	30,008,125.00	12	bula n	31,587,500.00	12	bula n	33,250,000.00	12	bula n	35,000,000.00	12	bula n	36,750,000.00	12	bula n	40,425,000.00
	1153	penyediaan obat dan BMHP bersumber kapitasi BPJS	0	bula n	00.00	0	bula n	00.00	0	bula n	00.00	0	bula n	00.00	12	bula n	1,126,433,032.00	12	bula n	1,500,000,000.00
	2009	Monitoring evaluasi dan pelaporan	0	pk m	00.00	0	pk m	00.00	0	pk m	00.00	0	pk m	00.00	0	pk m	00.00	27	pk m	17,875,000.00
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	60	%	18,004,875,000	60	%	18,952,500,000	62	%	19,950,000,000	64	%	21,000,000,000	65	%	22,575,000,000	100	%	17,737,500,71
	1156	Pengawasan makanan dan kesehatan makanan hasil industri	24	Pk m	12,860,625.00	24	pk m	13,537,500.00	24	pk m	14,250,000.00	24	pk m	15,000,000.00	24	pk m	16,125,000.00	24	pk m	17,737,500.00
	1157	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	21	Lok asi	5,144,250.00	22	Lok asi	5,415,000.00	23	Lok asi	5,700,000.00	24	Lok asi	6,000,000.00	25	Lok asi	6,450,000.00	26	Lok asi	0,04930556
		Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Farmasi	85	%	0	90	%	0	92	%	0	94	%	##### ##	96	%	##### ##	100	%	12,318,622,800,00
	1154	Penyediaan obat (DAK)	0	Pak et	00.00	0	pak et	00.00	0	pak et	00.00	1	pak et	9,331,880,000.00	1	pak et	10,265,068,000.00	1	pak et	11,291,574,800.00
	1155	Pengadaan sarana pendukung instalasi Farmasi (DAK)	0	Pak et	00.00	0	pak et	00.00	0	pak et	00.00	1	pak et	848,800,000.00	1	pak et	933,680,000.00	1	pak et	1,027,048,000.00
Persentase pengobatan tradisional yang dibina		Program Obat Asli Indonesia	75	%	9,431,125,000	75	%	9,927,500,000	80	%	10,450,000,000	85	%	11,000,000,000	90	%	11,825,000,000	100	%	31,862,500,000
	1367	pembinaan pengobatan tradisional (BATRA)	1	Kali	9,431,125.00	1	kali	9,927,500.00	1	kali	10,450,000.00	1	kali	11,000,000.00	1	kali	11,825,000.00	1	kali	13,007,500.00

			2004 Pendidikan dan Pelatihan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	0	Kali	00.00	1	Kali	18,855,000.00
Meningkatkan lingkungan bersih dan hidup sehat	Peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Persentase Desa Siaga aktif strata mandiri	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	persentase Rumah Ber- PHBS	5	%	267.501.039,00	9	%	310.805.041,00	13	%	320.055.043,24	18	%	258.872.545,00	27	%	440.466.048,00	35	%	447.940.053,00
			1124 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jenis Promosi Kesehatan Melalui Media Masa	4	Jenis	21,434,375.00	4	Jenis	22,562,500.00	4	Jenis	00.24	4	Jenis	25,000,000.00	4	Jenis	26,875,000.00	4	Jenis	29,562,500.00
			1125 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	Jumlah Tenaga Penyuluh Kesehatan Mengikuti Pendidikan	23	Orang	30,008,125.00	23	Orang	31,587,500.00	23	Orang	33,250,000.00	24	Orang	35,000,000.00	24	Orang	37,625,000.00	25	Orang	41,387,500.00
			1126 Peningkatan Kegiatan DBH-CHT	Jumlah Gedung Tempat Merokok	1	Unit	107,171,914.00	1	Unit	112,812,541.00	1	Unit	118,750,043.00	1	Unit	25,000,045.00	1	Unit	134,375,048.00	1	Unit	147,812,553.00
			1128 Peringatan Hari Kesehatan Nasional	Terseenggaranya Kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional	1	Kali	21,434,375.00	1	Kali	22,562,500.00	1	Kali	23,750,000.00	1	Kali	25,000,000.00	1	Kali	26,875,000.00	1	Kali	29,562,500.00
			1129 Lomba Bersih Sehat	Terseenggaranya Lomba Bersih Sehat	23	Puskesmas	14,575,375.00	23	Puskesmas	15,342,500.00	23	Puskesmas	16,150,000.00	24	Puskesmas	17,000,000.00	25	Puskesmas	18,275,000.00	27	Puskesmas	20,102,500.00
			1130 Survey kepuasan konsumen	Terseenggaranya Survey Konsumen	1	Kali	30,008,125.00	1	Kali	31,587,500.00	1	Kali	33,250,000.00	1	Kali	35,000,000.00	1	Kali	37,625,000.00	1	Kali	41,387,500.00
			1131 Pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) bidang kesehatan	Terlaksananya Pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) Bidang Kesehatan	1	Kali	12,860,625.00	1	Kali	13,537,500.00	1	Kali	14,250,000.00	1	Kali	15,000,000.00	1	Kali	16,125,000.00	1	Kali	1,737,500.00
			1132 Pembinaan Posyandu	Jumlah Posyandu yang dibina	391	Posyandu	10,288,500.00	395	Posyandu	10,830,000.00	400	Posyandu	11,400,000.00	405	Posyandu	12,000,000.00	410	Posyandu	12,900,000.00	415	Posyandu	14,190,000.00
			2019 Pelayanan Publik	Jumlah posyandu	0	Orang	00.00	10	Orang	29,225,000.00	5	Orang	47,405,000.00	5	Orang	46,872,500.00	5	Orang	105,066,000.00	5	Orang	95,000,000.00
			1127 Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga	Jumlah Desa yang dibina Desa Siaga	2	Desa	19,719,625.00	2	Desa	20,757,500.00	2	Desa	21,850,000.00	2	Desa	23,000,000.00	2	Desa	24,725,000.00	2	Desa	27,197,500.00
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	61	%	10,288,500.00	65	%	10,830,000.00	69	%	11,400,000.00	73	%	12,000,000.00	79	%	12,900,000.00	85	%	74,190,000.00

			861 Pengkajian, pengembangan lingkungan sehat	Terlaksananya Pengkajian, pengembangan lingkungan sehat	1 kali	5,144,250.00	1 kali	5,415,000.00	1 kali	5,700,000.00	1 kali	6,000,000.00	1 kali	6,450,000.00	1 kali	7,095,000.00
			865 Pembinaan Usaha Kesehatan Kerja	Terlaksananya pembinaan usaha kesehatan kerja	1 Kali	5,144,250.00	1 Kali	5,415,000.00	1 Kali	5,700,000.00	1 Kali	6,000,000.00	1 Kali	6,450,000.00	1 Kali	7,095,000.00
			2001 Sosialisasi Kebijakan lingkungan sehat	Terlaksananya tatanan kabupaten sehat	0 Kali	00.00	0 Kali	00.00	0 Kali	00.00	0 Kali	00.00	0 Kali	00.00	1 Kali	20,000,000.00
			2002 monitoring evaluasi dan pelaporan	Penguatan program kesling dan kesehatan kerja dan olah raga	0 Puskesmas	00.00	0 Puskesmas	00.00	0 Puskesmas	00.00	0 Puskesmas	00.00	0 Puskesmas	00.00	27 Puskesmas	15,000,000.00
			2003 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah desa melaksanakan STBM	0 Desa	00.00	0 Desa	00.00	0 Desa	00.00	0 Desa	00.00	0 Desa	00.00	25 Desa	25,000,000.00
Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Meningkatnya implementasi SPIP	Persentase Penyelesaian Tindakan Lanjut Temuan oleh pemeriksa internal dan eksternal	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Opini BPK	WDP	388.581.875,00	WDP	40.612.500,00	WDP	42.750.000,00	WDP	45.000.000,00	WDP	48.375.000,00	WTP	53.212.500,00
			860 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Laporan Pelaksanaan SPIP Yang disusun	1 dokumen	388,581,875.00	1 dokumen	40,612,500.00	1 dokumen	42,750,000.00	1 dokumen	45,000,000.00	1 Dokumen	48,375,000.00	1 dokumen	53,212,500.00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP Dinas Kesehatan	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	C	98.598.125,00	C	103.787.500,00	C	109.250.000,00	B	115.000.000,00	BB	123.625.000,00	BB	135.987.500,00	
			1293 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	12,860,625.00	1 Dokumen	13,537,500.00	1 Dokumen	14,250,000.00	1 Dokumen	15,000,000.00	1 Dokumen	16,125,000.00	1 Dokumen	17,737,500.00
			1295 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD	Jumlah dokumen Laporan Aset SKPD yang disusun	12 dokumen	51,442,500.00	12 dokumen	54,150,000.00	12 dokumen	57,000,000.00	12 dokumen	60,000,000.00	12 Dokumen	64,500,000.00	12 dokumen	70,950,000.00

1296 Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang disusun	1	Dokumen	12,860,625.00	1	Dokumen	13,537,500.00	1	Dokumen	14,250,000.00	1	Dokumen	15,000,000.00	1	Dokumen	16,125,000.00	1	Dokumen	17,737,500.00
1298 Penyusunan pelaporan keuangan semester yang disusun	Jumlah laporan keuangan semester yang disusun	2	Dokumen	21,434,375.00	2	Dokumen	22,562,500.00	2	Dokumen	23,750,000.00	2	Dokumen	25,000,000.00	2	Dokumen	26,875,000.00	2	Dokumen	29,562,500.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	90	%	2.669.865.750,00	91	%	2.972.835.000,00	92	%	1.324.300.000,81	93	%	5.033.800.000,00	94	%	5.366.425.000,00	95	%	5.441.505.000,00
753 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen, surat yang terselesaikan	300	surat	4,286,875.00	320	surat	4,512,500.00	350	surat	4,750,000.00	400	surat	5,000,000.00	410	surat	5,375,000.00	420	surat	5,912,500.00
754 Penyediaan jasa komunikasi,su mber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	171,475,000.00	12	bulan	180,500,000.00	12	bulan	190,000,000.00	12	bulan	200,000,000.00	12	bulan	315,000,000.00	12	bulan	336,500,000.00
755 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terlunasi pajaknya	20	unit	34,295,000.00	20	unit	36,100,000.00	21	unit	38,000,000.00	21	unit	40,000,000.00	22	unit	43,000,000.00	23	unit	47,300,000.00
756 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12	bulan	64,303,125.00	12	bulan	67,687,500.00	12	bulan	71,250,000.00	12	bulan	210,000,000.00	12	bulan	220,000,000.00	12	bulan	230,687,500.00
757 Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	12	bulan	17,147,500.00	12	bulan	180,500,000.00	12	bulan	190,000,000.00	12	bulan	200,000,000.00	12	bulan	51,500,000.00	12	bulan	53,650,000.00
758 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran	200	orang	1,629,012.500.00	250	orang	1,714,750,000.00	300	orang	0,05625	450	orang	3,328,800,000.00	480	orang	3,420,000,000.00	500	orang	3,446,750,000.00
759 Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS	tersedianya polis dan kartu asuransi jiwa uran kesehatan bagi tenaga kerja kontrak melalui bpjs	12	orang	00.00	12	orang	00.00	12	orang	00.00	12	orang	51,000,000.00	12	orang	56,000,000.00	12	orang	60,200,000.00
760 Jasa Jaminan Ketenagakerjaa n Non PNS	tersedianya polis dan kartu asuransi jiwa uran ketenagakerjaan bagi tenaga kerja kontrak melalui bpjs	0	Orang	00.00	0	Orang	00.00	0	Orang	00.00	0	Orang	00.00	0	Orang	00.00	600	Orang	50,000,000.00
761 Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	42,868,750.00	12	bulan	45,125,000.00	12	bulan	47,500,000.00	12	bulan	50,000,000.00	12	bulan	53,500,000.00	12	bulan	59,125,000.00



762	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan pengadaan	4	jenis	24,863,875.00	4	jenis	26,172,500.00	4	jenis	27,550,000.00	4	jenis	29,000,000.00	4	jenis	31,175,000.00	4	jenis	34,292,500.00
763	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik yang diadakan	4	jenis	42,868,750.00	4	jenis	45,125,000.00	4	jenis	47,500,000.00	4	jenis	50,000,000.00	8	jenis	180,000,000.00	4	jenis	59,125,000.00
764	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang diadakan	10	media massa	30,008,125.00	10	media massa	31,587,500.00	10	media massa	33,250,000.00	10	media massa	35,000,000.00	10	media massa	37,625,000.00	10	media massa	41,387,500.00
765	Penyediaan makanan dan minuman pegawai/pasien/tamu	tersedianya makanan dan minuman pegawai/pasien/tamu	12	bulan	51,442,500.00	12	bulan	54,150,000.00	12	bulan	57,000,000.00	12	bulan	60,000,000.00	12	bulan	64,500,000.00	12	bulan	70,950,000.00
766	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	prekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	250	kali	385,818,750.00	260	kali	406,125,000.00	270	kali	427,500,000.00	280	kali	450,000,000.00	290	kali	483,750,000.00	300	kali	532,125,000.00
767	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	prekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	200	kali	171,475,000.00	200	kali	180,500,000.00	200	kali	190,000,000.00	200	kali	325,000,000.00	200	kali	335,000,000.00	200	kali	336,500,000.00
1402	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	2	Unit	70,000,000.00	2	Unit	77,000,000.00
	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti	1	Kali	38.581.875	1	Kali	40.612.500	2	Kali	42.750.000	3	Kali	45.000.000	4	Kali	48.375.000	5	Kali	53.212.500
1313	Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan	Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan	1	Kali	38,581,875.	1	Kali	40,612,500	1	Kali	42,750,000	1	Kali	45,000,000	1	Kali	48,375,000.00	1	Kali	53,212,500
	Program peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	70	%	98.598.125	-	%	103.787.500	-	%	109.250.000	-	%	125.000.000	-	%	173.625.000	95	%	224.987.500
1306	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD selama 5 tahun	0	Dokumen	00.00	0	Dokumen	00.00	0	Dokumen	00.00	0	Dokumen	00.00	0	Dokumen	00.00	1	Dokumen	25,000,000
1307	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	1	Dokumen	12,860,625	1	Dokumen	13,537,500	1	Dokumen	14,250,000.	1	Dokumen	25,000,000	1	Dokumen	26,125,000	1	Dokumen	27,737,500
1308	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	4	Dokumen	85,737,500	4	Dokumen	90,250,000	4	Dokumen	95,000,000.00	4	Dokumen	100,000,000.00	4	Dokumen	107,500,000.00	4	Dokumen	118,250,000.00

1309	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang yang disusun	0	dokumen	00.00	0	dokumen	00.00	0	dokumen	00.00	0	dokumen	00.00	0	Dokumen	00.00	1	dokumen	10,000,000.00
1312	Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Terlaksananya Evaluasi Rencana Kerja SKPD	0	Dokumen	00.00	0	Dokumen	00.00	0	Dokumen	00.00	0	Dokumen	00.00	1	Dokumen	40,000,000.00	1	Dokumen	44,000,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	75	%	1.897.484.750,00	80	%	1.835.217.500,00	82	%	1.901.400.000,00	83	%	1.610.250.000,57	84	%	3.916.750.000,00	85	%	2.587.675.000,00
1273	Pembangunan gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	0	Unit	00.00	1	Unit	51,250,000.00	1	Unit	58,000,000.00	1	Unit	63,800,000.00
1276	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang diadakan	1	Unit	257,212,500.00	1	Unit	270,750,000.00	1	Unit	285,000,000.00	1	Unit	300,000,000.00	1	Unit	322,500,000.00	1	Unit	354,750,000.00
1277	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	7	Unit	313,200,000.00	11	Unit	161,812,500.00	12	Unit	188,500,000.00	13	Unit	200,000,000.00	14	Unit	220,000,000.00	15	Unit	240,000,000.00
1278	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	10	Unit	55,729,375.00	10	Unit	58,662,500.00	10	Unit	6,750,000.00	10	Unit	65,000,000.00	10	Unit	69,875,000.00	10	Unit	76,862,500.00
1280	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	4	Unit	51,442,500.00	4	Unit	54,150,000.00	4	Unit	57,000,000.00	4	Unit	60,000,000.00	4	Unit	64,500,000.00	4	Unit	70,950,000.00
1283	Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang diadakan	60	Unit	48,870,375.00	65	Unit	51,442,500.00	70	Unit	54,150,000.00	75	Unit	00.57	80	Unit	60,000,000.00	85	Unit	66,000,000.00
1284	Pengadaan komputer	Jumlah perangkat komputer yang disediakan	1	Unit	5,000,000.00	2	Unit	11,000,000.00	3	Unit	18,000,000.00	4	Unit	24,000,000.00	8	Unit	80,000,000.00	8	Unit	88,000,000.00
1285	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi yang disediakan	1	Unit	30,008,125.00	1	Unit	31,587,500.00	1	Unit	33,250,000.00	1	Unit	35,000,000.00	1	Unit	40,000,000.00	1	Unit	44,000,000.00
1287	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	8	Unit	51,442,500.00	8	Unit	54,150,000.00	8	Unit	57,000,000.00	8	Unit	60,000,000.00	8	Unit	64,500,000.00	8	Unit	70,950,000.00
1289	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor yang direhab	5	Unit	28,687,500.00	8	Unit	451,250,000.00	9	Unit	475,000,000.00	2	Unit	50,000,000.00	2	Unit	2,000,000,000.00	2	Unit	.591,250,000.00

1290 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas yang dipelihara	8	Unit	85,737,500.00	8	Unit	90,250,000.00	9	Unit	95,000,000.00	6	Unit	100,000,000.00	5	Unit	207,500,000.00	3	Unit	.118,250,000.00
1291 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	28	unit	21,434,375.00	28	unit	22,562,500.00	28	unit	23,750,000.00	28	unit	25,000,000.00	28	unit	26,875,000.00	28	unit	29,562,500.00
1364 pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun	4	unit	514,425,000.00	4	unit	541,500,000.00	4	unit	570,000,000.00	4	unit	600,000,000.00	4	unit	660,000,000.00	4	unit	726,000,000.00
1378 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	10	Unit	34,295,000.00	10	Unit	36,100,000.00	10	Unit	38,000,000.00	10	Unit	40,000,000.00	10	Unit	43,000,000.00	10	Unit	47,300,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	75	%	212.200.300,00	80	%	223.368.750,00	82	%	235.125.000,00	83	%	247.500.000,00	84	%	616.062.500,00	85	%	672.668.750,00
1304 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang disediakan	750	Stel	212,200,300.00	800	Stel	223,368,750.00	850	Stel	235,125,000.00	900	Stel	247,500,000.00	950	Stel	266,062,500.00	1000	Stel	292,668,750.00
1305 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus yang disediakan	0	Stel	00.00	0	Stel	00.00	0	Stel	00.00	0	Stel	00.00	900	Stel	350,000,000.00	950	Stel	380,000,000.00
Program Penyelenggaraan Aparatur	Rata-rata Prestasi Kinerja tenaga fungsional	94	%	21.434.375,00	94	%	22.562.500,00	94	%	23.750.000,00	96	%	25.000.000,00	98	%	26.250.000,00	100	%	28.875.000,00
634 Penyusunan dan penetapan angka kredit	Tersusunnya angka kredit pegawai fungsional	400	Orang	21,434,375.00	400	Orang	22,562,500.00	405	Orang	23,750,000.00	412	Orang	25,000,000.00	415	Orang	26,250,000.00	420	Orang	28,875,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kompetensi teknis aparatur sipil Negara (ASN)	20	%	53.543.068,00	25	%	56.361.125,00	28	%	59.327.500,00	31	%	262.450.000,00	36	%	307.500.000,00	40	%	374.250.000,00
1300 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	Orang	00.00	0	Orang	00.00	0	Orang	00.00	20	Orang	100,000,000.00	20	Orang	120,000,000.00	20	Orang	150,000,000.00
1301 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Personil Yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2	Orang	32,108,693.00	2	Orang	33,798,625.00	2	Orang	35,577,500.00	2	Orang	37,450,000.00	2	Orang	40,000,000.00	2	Orang	44,000,000.00
1302 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti BinteK Teknis Fungsional	0	Orang	00.00	0	Orang	00.00	0	Orang	00.00	15	Orang	100,000,000.00	15	Orang	120,000,000.00	15	Orang	150,000,000.00

		1370 Peningkatan sumber daya manusia tenaga kesehatan	jumlah peserta bimtek/kursus tingkat tenaga kesehatan	8	orang	21,434,375.00	8	orang	22,562,500.00	8	orang	23,750,000.00	9	orang	25,000,000.00	9	orang	27,500,000.00	9	orang	30,250,000.00
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Jenjang Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN)	95	%	0	95	%	0	96	%	0	96	%	15,000,000.00	98	%	16,250,000.00	100	%	18,150,000.00
		684 Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja kepegawaian	Jumlah dokumen analisis jabatan dan beban kerja	0	dokumen	00.00	0	dokumen	00.00	0	dokumen	00.00	2	dokumen	15,000,000.00	2	Dokumen	16,250,000.00	2	dokumen	18,150,000.00

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN**  
**TAHUN 2014-2018**

Pada era reformasi dan desentralisasi, keterbukaan publik terhadap pelayanan kesehatan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Merangin, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditunjukkan dengan Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 seperti yang ditampilkan pada Tabel 6.1 dibawah ini :

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penemuan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	90%	90%	91%	93%	95%	96%	100%
2	Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	92%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	17 kasus	17 kasus	11 kasus	10 kasus	9 kasus	8 kasus	8 kasus
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	85 kasus	85 kasus	40 kasus	50 kasus	53 kasus	50 kasus	50 Kasus
5	Persentase puskesmas yang terkakreditasi	-	-	17%	43%	82%	100%	100%
6	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	90%	90%	92%	93%	94%	95%	95%
7	Persentase pengobatan tradisional yang dibina	20%	20%	25%	30%	35%	40%	40%
8	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	13.2%	13.2%	24%	41%	67%	85%	85%
9	Persentase Desa Siaga aktif starta mandiri	3%	3%	4%	5%	6%	7%	7%
10	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan oleh pemeriksa internal dan eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan	C	C	C	B	BB	BB	BB

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Persentase bumil yang mendapat tablet tambah darah	75%	75%	77%	80%	35%	32%	32%
13	Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah	8%	NA	NA	8%	10%	12%	12%
14	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	60%	70%	73%	75%	78%	80%	80%
15	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	61%	65%	69%	73%	79%	85%	85%
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM C	IKM C	IKM B	IKM B	IKM B	IKM B	IKM B
17	Persentase Kecamatan yang memiliki Puskesmas sesuai standar	77%	84%	88%	90%	95%	100%	100%
18	Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40%	45%	46%	45%	50%	53%	53%
19	Persentase pelayanan kesehatan yang mendapatkan jaminan kesehatan	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
20	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	10 Puskesmas	10 puskesmas	10 puskesmas	12 puskesmas	14 puskesmas	17 puskesmas	17 puskesmas
21	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	11 puskesmas	11 puskesmas	13 puskesmas	13 puskesmas	13 puskesmas	10 puskesmas	10 puskesmas
22	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	85%	90%	92%	94%	96%	100%	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin termuat dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 yang mengatur petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014-2018 seperti yang ditampilkan pada Tabel 6.2 dibawah ini :

**Tabel 6.2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**

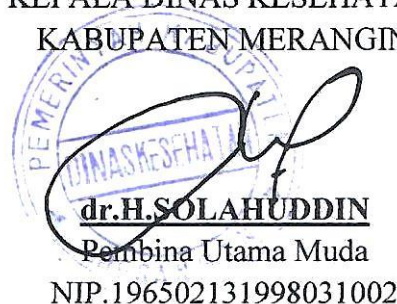
No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	13,20%	13,20 %	24,00 %	41,00 %	67,00 %	85,00 %	85%
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	18 Kasus	17 Kasus	11 Kasus	10 Kasus	9 Kasus	8 kasus	8 Kasus
3	Angka kematian bayi (AKB)	85 Kasus	85 Kasus	40 Kasus	50 Kasus	53 Kasus	50 kasus	50 kasus

## **BAB VII PENUTUP**

Dengan tersusunnya RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, maka dengan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta menjadi pelaksana pencapaian target-target visi misi RPJMD 2014-2018.

Disamping itu pula sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin serta dapat juga memberikan motivasi bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MERANGIN



**dr.H.SOLAHUDDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196502131998031002